

## DOKUMENTASI

1. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Dan Pencacahan Indeks Desa Membangun (IDM)



2. Peserta Kegiatan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)



3. Ikut serta dalam kepanitiaan kegiatan Indeks Desa Membangun (IDM)



LAMPIRAN 1

4. Persiapan untuk kegiatan



5. Peserta mengisi daftar hadir



LAMPIRAN 1

6. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan staff lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember





7. Wawancara dengan Sekretaris Desa Puger Kulon



8. Wawancara dengan sekretaris Desa Puger Wetan





## **DAFTAR INFORMAN**

1. Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
2. Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
3. Staff Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4. Pendamping Desa
5. Sekertaris Desa





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA

Jl. TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan Tlp. 021-79172244 Fax.021-79172242  
[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)

Jakarta, 26 Februari 2018

Nomor : 15/PR.01-02/11/2018  
Lampiran : -  
Hal : Pemutakhiran IDM 2018 untuk  
Pengukuran Status Perkembangan  
Desa Tahun 2017

Kepada Yth,  
Daftar terlampir

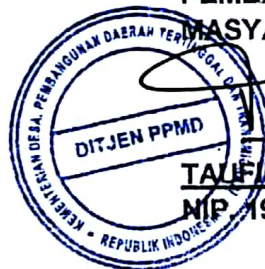
Di -  
Tempat

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan, maka diperlukan ketersediaan Data Pembangunan Desa serta Penetapan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Berdasarkan Permendesa Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Indeks Desa Membangun pada Pasal 8 Ayat 3 disebutkan tentang Pendayagunaan Indeks Desa Membangun, mengingat sangat pentingnya Data IDM dimaksud maka Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa akan melakukan Pemutakhiran IDM 2018 untuk Pengukuran Status Perkembangan Desa Tahun 2017. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran IDM 2018 untuk Pengukuran Status Perkembangan Desa Tahun 2017 akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2018 (*jadwal terlampir*).
2. Mohon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi dan Kabupaten, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi dan Kabupaten, serta Kecamatan dan Pemerintah Desa membantu proses Pemutakhiran dimaksud.
3. Tenaga Profesional P3MD wajib terlibat aktif dalam proses Pemutakhiran IDM 2018 untuk Pengukuran Status Perkembangan Desa Tahun 2017 sebagai salah satu penilaian kinerja.
4. Masing - masing pihak yang terlibat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran IDM.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA,



*Tajuk Madjid*  
TAJUK MADJID, S.Sos. M.Si  
NIP. 19710701 199903 1 013

Tembusan :  
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

## **Lampiran 1**

1. Kepala Dinas PMD Provinsi Se – Indonesia
2. Kepala Bappeda Provinsi Se – Indonesia
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Se – Indonesia
4. Kepala Bappeda Kabupaten Se – Indonesia
5. Camat Se – Indonesia
6. Kepala Desa Se – Indonesia
7. Tenaga Ahli Provinsi Se – Indonesia
8. Tenaga Ahli Kabupaten Se – Indonesia
9. Pendamping Desa Se – Indonesia
10. Pendamping Lokal Desa Se – Indonesia







**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

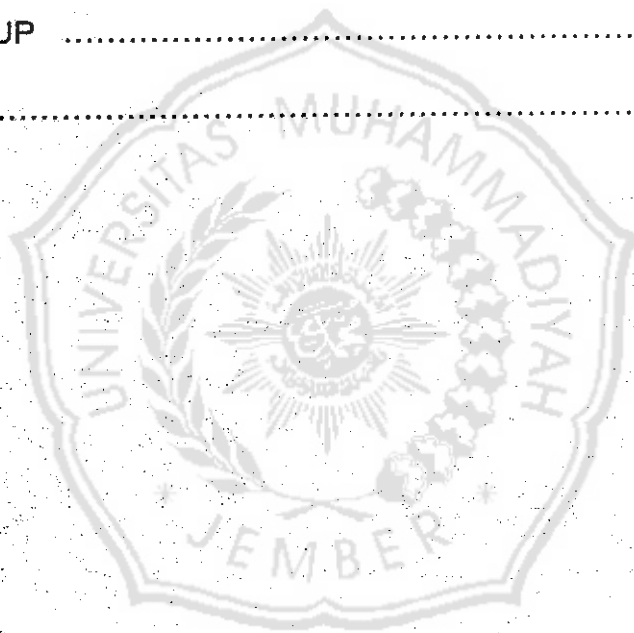
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2017**

## DAFTAR ISI

	Hal :
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD .....	6
2.2 Sumber Daya .....	23
2.3 Kinerja Pelayanan .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	28
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>32</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota .....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup..	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	41
<b>BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.</b>	<b>45</b>
4.1 Visi dan Misi .....	45
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	45
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	47

<b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA</b>	
<b>KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>50</b>
5.1 Pengantar .....	50
5.2 Rencana Program dan Kegiatan OPD .....	50
<b>BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN</b>	
<b>SASARAN RPJMD. ....</b>	<b>51</b>
6.1 Pengantar .....	51
6.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	53
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>





## KATA PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan - perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti peraturan perundangan tersebut ke dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai wujud pelaksanaan dalam Program dan Kegiatan selama 5 (lima) Tahun yang terukur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 sebagai tindaklanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 menjelaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Jember adalah "***Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri***", sedangkan Misi Pembangunan meliputi : ***1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ; 2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Berkeadilan ; 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.*** Berlandaskan Visi dan Misi tersebut, maka pembangunan di Kabupaten Jember dilaksanakan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada masyarakat atau rakyat (people centered development) dengan mengedepankan partisipasi masyarakat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat khususnya melalui ekonomi kerakyatan menuju kemandirian dan berdaya saing.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk memandirikan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah menempatkan inisiatif dan kreatifitas dari rakyat bersama Pemerintahan Desa sebagai subyek dan sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kemakmuran serta kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang akan dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi sumber daya manusia di desa, sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan dapat memberi peran dan kontribusi pada masyarakat desa untuk menjadi subyek bukan sebagai obyek.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPEMASDES) Kabupaten Jember sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016, merupakan leading sektor program & kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa menuju kemandirian masyarakat desa di Kabupaten Jember sehingga diharapkan dapat mendorong serta berkontribusi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Jember.

Dalam rangka mengejawantahkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ke dalam rencana Organisasi Perangkat Daerah, sangat diperlukan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang disusun setiap tahunnya sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat memberikan arah seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang aada atau yang dimungkinkan timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan srategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

.Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, Pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis Renstra K/L dan Pemerintah Provinsi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan), melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk



melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dan sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
- q. Peraturan Bupati Jember nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

### **1.3 Maksud & Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk dapat memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sesuai tugas dan fungsinya serta tata kerja dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah untuk (1) Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 ke dalam rencana strategis organisasi perangkat daerah; (2) Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) Memberikan gambaran kinerja pelayanan OPD, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang OPD dalam pengembangan

pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan, menjelaskan kedudukan dan peranan Perubahan RENSTRA SKPD dalam perencanaan Pembangunan Daerah serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN**, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kekuatan Sumberdaya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, Kinerja pelayanan tahun sebelumnya serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas kinerja pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Jember Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta Penentuan isu-isu strategis yang berkembang.
- BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, berisi tentang, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**, berisi tentang Rencana program dan kegiatan OPD, indikator kinerja, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaan secara indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**, berisi tentang indikator kinerja OPD yang mengacu dan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB VII PENUTUP**, berisi kesimpulan akhir penyusunan Rencana Strategis.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan, di Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, dan di Bidang Pemerintahan Desa, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember meliputi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan, Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, Bidang Pemerintahan Desa, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan serta urusan rumah tangga ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
4. Pengelolaan kearsipan dinas ;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas;
2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
5. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yang meliputi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, tata naskah dinas dan tata kearsipan;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
3. Pelaksanaan pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
5. Pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas;
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas meliputi :

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
2. Melaksanakan pengolahan data ;
3. Melaksanakan perencanaan program ;
4. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
5. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7. Melaksanakan penyusunan laporan ;dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Penyusunan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**c. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;



2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset-aset; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
3. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review anggaran;
4. Pelaksanakan, pembinaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban keuangan;
6. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan perbendaharaan Sistem Akuntansi Keuangan; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan ;
2. Penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya

masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ;

3. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
4. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ;
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan; dan
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya ;
- b. Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan ; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan.

Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan.

**a. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya**

Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat ;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ; dan

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi meliputi:

1. Pelaksanaan pembinaan pada masyarakat pedesaan dan kelurahan, serta kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ;
2. Pendampingan dan fasilitasi peran partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah
3. Pengawasan dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah, dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**b. Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan.**

Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, verifikasi keluarga miskin, peningkatan kualitas rumah kurang layak huni, dan pendampingan penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan penguatan kelembagaan TP-PKK daerah;
2. Pendampingan dan fasilitasi kelompok kerja pelayanan posyandu melalui Sekretariat Pokjanal Posyandu tingkat daerah ;

3. Pendampingan dan fasilitasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan dhuafa, verifikasi dan peningkatan kualitas rumah kurang layak huni bagi keluarga miskin dan dhuafa ;
4. Pengawasan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya ; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan.**

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan ;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendampingan desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya ;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan ;
2. Pendampingan dan fasilitasi desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya ;
3. Pendampingan dan fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

### **3. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna**

Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ;
2. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
3. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa ;
4. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi ;
5. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat.

Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

#### **a. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa**

Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat dan revitalisasi pasar desa ;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal ; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
2. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa dan revitalisasi pasar desa ;
3. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat**

Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal ;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan desa berbasis teknologi informasi ;



3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penumbuhan inovasi teknologi tepat guna berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gelar teknologi tepat guna berorientasi pasar dan padat karya ; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal ;
2. Pendampingan dan fasilitasi pengembangan desa berbasis teknologi informasi
3. Pendampingan dan fasilitasi penumbuhan inovasi teknologi tepat guna berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
4. Pendampingan dan fasilitasi kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan dan padat karya ; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan**

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa, menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, menginventarisasi aset dan kekayaan desa, memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa, melaksanakan pengembangan BUMDesa ; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
2. Pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
5. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa;
6. Pelaksanaan dan pengembangan BUMDesa ; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
- b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.

Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

**a. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa.**

Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan pendapatan dan kekayaan desa;
2. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
3. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Pendapatan dan kekayaan desa;
4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan aset dan Kekayaan desa;
5. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan BUMDesa ; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tanah kas desa;
2. Pendampingan dan fasilitasi tukar guling dan pengadaan tanah kas desa;
3. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset dan Kekayaan Desa;
4. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
5. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan BUMDesa;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa;
7. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset dan kekayaan desa dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli desa; dan
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.**

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- 2.. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
3. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
4. Memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan APBDes dan Laporan Keuangan Desa;
5. Memfasilitasi realisasi dan penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;

2. Fasilitasi dan verifikasi RPJMDes, APBDDes dan tukar guling dan pengadaan tanah kas desa;
3. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa
5. Pelaksanaan pencairan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
6. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **5. Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan penataan desa, menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan Penataan Desa ;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;
5. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun; dan
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa.

Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

**a. Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa ; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan Penataan dan Kodifikasi Desa
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pemilihan kepala desa, pembentukan BPD, pemekaran desa, pemekaran dusun dan kerjasama desa;
3. Pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **b. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa**

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa, mempunyai tugas meliputi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa
2. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa;
4. Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi dan Pelanggaran disiplin Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pelaksanaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa melalui indikator angka indeks membangun; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Pengembangan kapasitas aparatur desa;
2. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
3. Pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi desa dan pelanggaran disiplin aparatur penyelenggara pemerintahan desa
4. Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi dan penataan aparatur desa;
5. Penyusunan konsep Peraturan Bupati/Keputusan Bupati tentang pengangkatan, pemberhentian dan teguran kepada aparatur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan kebijakan tentang pelaksanaan administrasi dan penataan aparatur desa;
7. Pendampingan dan fasilitasi evaluasi tingkat perkembangan desa melalui indikator angka indeks membangun ;dan
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

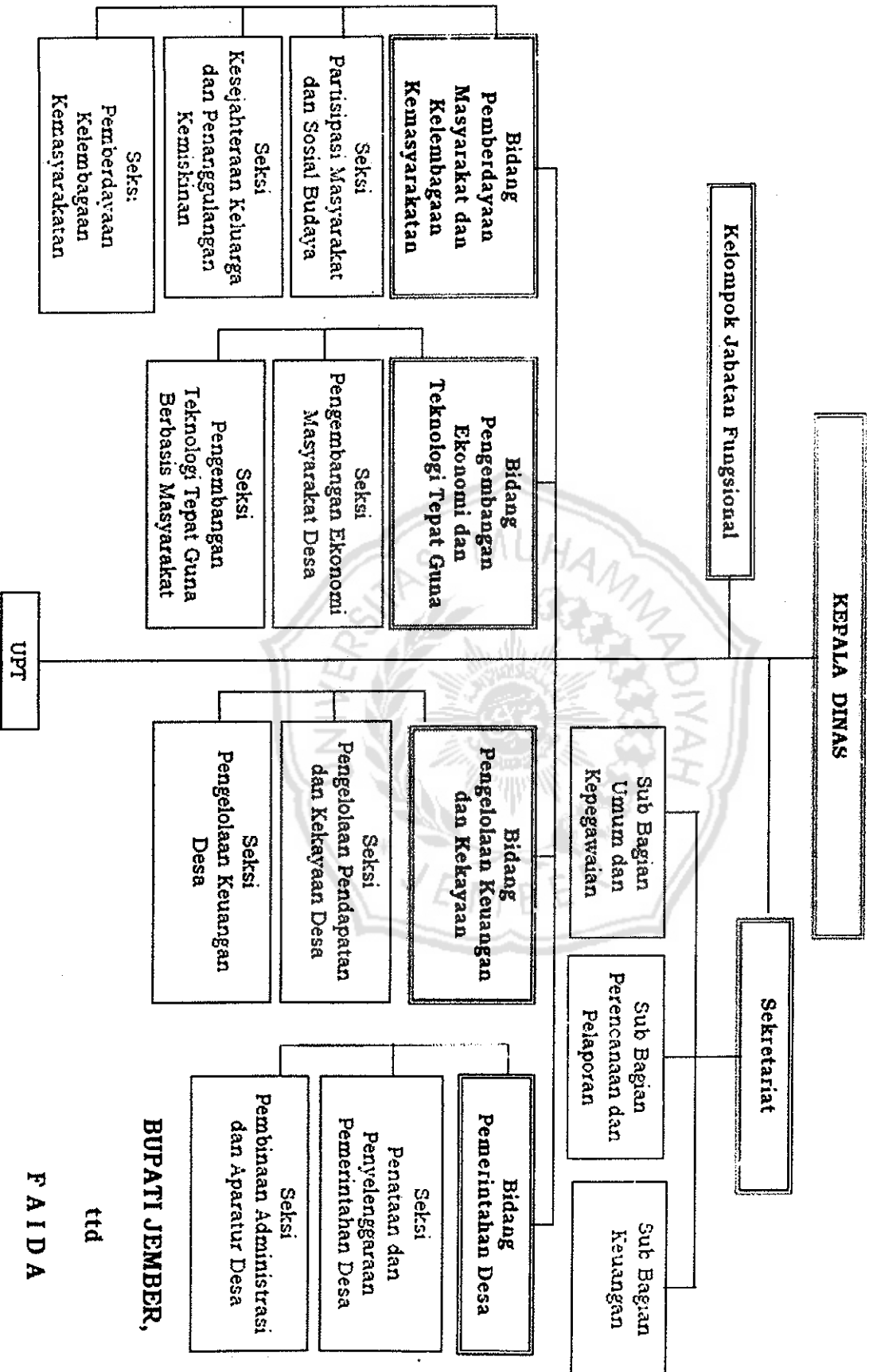
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berikut adalah penjelasan kelompok jabatan fungsional :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBER



BUPATI JEMBER,

tttd

FAIDA

## **2.2 Sumber Daya**

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember didukung sumberdaya manusia sejumlah 33 orang PNS yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 8 perempuan. Aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan daya saing daerah. Dalam kondisi ideal sesuai analisa jabatan (bezeting) dengan memperhatikan struktur organisasi saat ini jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember membutuhkan 48 orang dari ketersediaan aparatur / sumber daya manusia saat ini yang hanya 29 orang atau 60%, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 19 orang atau 40%. Saat ini komposisi sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menurut latar belakang pendidikan sebesar 15% atau 5 orang PNS berpendidikan Pasca Sarjana Strata-2, 43 % atau 14 orang PNS berpendidikan Sarjana Strata-1, 9% atau 3 orang PNS berpendidikan Diploma 3, 30% atau 10 orang PNS berpendidikan SLTA dan 3% atau 1 orang PNS berpendidikan SLTP. Jika memperhatikan berdasarkan golongan kepangkatan PNS, Sumber Daya Manusia yang tersedia meliputi 30% atau 10 orang PNS golongan II/a s/d II/d, 55% atau 18 orang PNS golongan III/a s/d III/d, dan 15% atau 5 orang PNS golongan IV/a s/d IV/d. Adapun berdasarkan Tipe Pegawai kondisi Sumber Daya Manusia yang ada meliputi 55% atau 18 orang PNS menduduki Pejabat Struktural dan 45% atau 15 orang PNS menduduki Fungsional Umum. Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah sumber daya manusia yang tersedia tinggal 21 orang PNS, sehingga sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia (PNS) baru untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Selengkapnya data pegawai telah disajikan sebagaimana dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

Data Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Jember (Kondisi per Juni Tahun 2017)

NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		Laki-laki	Perempuan	
1.	<b>Jumlah Pegawai PNS</b>	25	8	33
2.	<b>Tingkat Pendidikan PNS</b>	25	8	33
	a. Doktor (S-3)	-	-	-
	b. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	3	2	5
	c. Sarjana Strata 1 (S-1)	11	3	14
	d. Diploma 3 (D-3)	2	1	3
	e. Diploma 2 (D-2)	-	-	-
	f. SLTA	8	2	10
	g. SLTP	1	-	1
	h. SD	-	-	-
3.	<b>Golongan Kepangkatan PNS</b>	25	8	33
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/d	-	-	-
	b. II/a	3	-	3
	II/b	2	-	2
	II/c	1	1	2
	II/d	2	1	3
	c. III/a	-	1	1
	III/b	4	1	5
	III/c	2	-	2
	III/d	7	3	10
	d. IV/a	1	1	2
	IV/b	2	-	2
	IV/c	1	-	1
	IV/d	-	-	-
4.	<b>PNS Menurut Golongan Umur</b>			
	a. < 30 tahun	1	1	2
	b. 30 - 39 tahun	2	-	2

	c. 40 - 49 tahun	10	3	12
	d. 50 - 55 tahun	2	3	5
	e. > 55 tahun	7	-	7
<b>5.</b>	<b>Tipe Pegawai</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
	a. Pejabat Struktural	14	4	18
	b. Fungsional Umum	11	4	15
	c. Fungsional Lain	-	-	-

Sumber : Sub Bag. Umum & Kepegawaian DIPEMASDES Kabupaten Jember (2017)

## 2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 535 buah/set atau senilai Rp. 3.732.346.210,- dengan 12 (dua belas) jenis barang yaitu Tanah, Alat-alat Angkutan, Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Alat-alat Laboratorium, Alat-alat Keamanan, Bangunan Gedung, Instalasi, Buku Perpustakaan, Hewan Ternak dan Tumbuhan dan Aset Tak Berwujud. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 487 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 48 buah aset dalam bentuk Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga yang terdiri dari Alat Kantor (Almari, Filing Kabinet, dll.), Alat Rumah Tangga (Kipas Angin, Televisi, AC), Peralatan Komputer (Komputer PC, Laptop, Printer, UPS), dan Meja Kursi Kerja dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Aset dalam kondisi rusak selanjutnya diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan Dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana sebagaimana data Tabel 2.2.



**Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember  
( Kondisi per Juni 2017 )**

NO.	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.)	KONDISI		KET.
					BAIK	RUSAK	
1	Tanah	1	Bidang	300.000.000,-	1	-	
2	Alat-Alat Angkutan	20	Unit	533.437.500,-	20	-	
3	Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur	3	Unit	28.255.000,-	3	-	
4	Alat-Alat Kantor & Rumah Tangga	510	Unit	1.627.723.760,-	510	48	Diusulkan penghapusan
5	Alat-Alat Studio & Komunikasi	29	unit	271.644.100,-	29	-	
6	Alat-Alat Laboratorium	1	unit	1.450.000,-	1	-	
7	Alat-Alat Keamanan	5	unit	43.515.200,-	5	-	
8	Bangunan Gedung	13	ruangan	1.445.909.225,-	13	-	
9	Instalasi	1	jaringan	4.343.800,-	1	-	
10	Buku Perpustakaan	14	buah	6.341.000,-	14	-	
11	Hewan Ternak & Tumbuhan	3	tanaman	2.175.000,-	3	-	
12	Aset Tak Berwujud (Website)	1	unit	18.500.000,-	1	-	
	<b>JUMLAH</b>	601		4.283.294.585,-	601	48	

Sumber : Sub Bag. Umum & Kepegawaian DIPEMASDES Kabupaten Jember (2017)

Catatan : Hewan Ternak & Tumbuhan : Tumbuhan untuk taman, Aset Tak Berwujud : Website DIPEMASDES

## 2.3 Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja dengan 10 indikator kinerja sasaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Capaian Kinerja Tahun 2010 - 2015

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPMD/K	226	226	226	248	248	248
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	280	280	280	280	280	280
3	Prosentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0,80%
4	Prosentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	1,5%	1,5%	1,5%	2%	2%	2%
7	Prosentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prosentase Tehnologi Tepat Guna yg diterapkan	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
9	Prosentase Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan	12,50%	12,50%	12,50%	14,51%	14,51%	14,51%
10	Prosentase Lembaga Ekonomi Pedesaan	0%	0%	0%	0%	0%	5,31%

Derajat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Jember yang masih tinggi menjadikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember. Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin adalah masyarakat pedesaan, dimana mereka dengan segala keterbatasannya memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan mandiri dan berkesinambungan.

Masih banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kemampuan daya beli dan pendapatan membawa pengaruh yang signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember. Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat masyarakat di pedesaan yaitu melalui memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember 2016-2021, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga pada penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan indikator kinerja mandiri, beberapa indikator kinerja terkait dengan indikator kinerja pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri maupun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Komparasi Capaian Sasaran Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terhadap Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut, antara lain: (a) masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya "bottom up planning"; (c) memampukan dan mengaktivitaskan ekonomi; (d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (d) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan bergairah kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa adalah merupakan suatu keniscayaan. Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD) dan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PPM) terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat, tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi OPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tidak menjadi Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, maka dapat dirumuskan

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ke depan sebagai berikut :

**a. Faktor Tantangan Organisasi**

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa mulai akhir 2016 hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dan desa dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat dan desa;
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**b. Faktor Peluang Organisasi**

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengandung arti untuk melindungi masyarakat dan desa;

- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat dan desa yang berkualitas dan berdaya saing, menuju masyarakat desa yang maju dan mandiri;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang menuntut masyarakat dan desa berperan aktif dan menjadi subyek dari kemajuan tersebut.



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan OPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada target indikator kinerja sasaran hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 90 %, walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta database yang masih terbatas.

Tabel.3.1

#### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Aspek Kajian / Indikator	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Tugas, Fungsi & Tata Kerja	Sesuai dengan PerBup No. 44 Tahun 2016	Indikator Kinerja Utama	SDM / Aparatur, Sarana, Prasarana, pendanaan, Tupoksi & Tata KerjaKebijakan	Nomenklatur, Tupoksi & Tata Kerja, Regulasi yg berbeda & pada (K/L) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan dinamika yang berkembang di Pemerintahan Desa	Perbedaan nomenklatur kelembagaan Pusat, OPD Pemerintah Prov dan Pemerintah Kab/Kota.



Aspek Kajian / Indikator	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Ketersediaan SDM	SDM sejumlah 33 orang yg terdiri dari 25 laki-laki & 8 perempuan jauh dari kondisi ideal, sehingga diperlukan tambahan aparatur/SDM	Indikator Kinerja Utama	Penempatan SDM hrs sesuai dengan kapasitas, kemampuan & tupoksi	Pengisian & penggantian PNS yg pensiun	Penempatan SDM kurang optimal sesuai kapasitas & kemampuan
Ketersediaan sarana prasarana	Jumlah aset 601, yang terdiri dari 601 kondisi baik dan 48 kondisi rusak. Perlunya pemeliharaan & perawatan pada aset-aset yang baik agar dapat dimanfaatkan optimal.	Indikator Kinerja Utama	Pemeliharaan & pengadaan sarana prasarana	Penghapusan aset yang rusak dan tidak dapat digunakan.	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi masih diperlukan pemeliharaan secara berkala semua aset yang kondisi baik.
Hasil gambaran pelayanan OPD					
Persentase Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (%)	14,51 %	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes & Masyarakat	Masih banyaknya sarana & prasarana yang perlu ditangani
Jumlah Desa / Kelurahan yang terkoneksi internet (Desa / Kelurahan)	0	Indikator Kinerja Utama	Keterbatasan akses jaringan, SDM terbatas	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes & Masyarakat	Kurang optimalnya peran Pemdes tentang pentingnya keterbukaan informasi publik
Jumlah Kerjasama Antar Desa (Lembaga)	26	Indikator Kinerja Utama	Batas & Asset Desa belum terdata dengan benar	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes & Masyarakat	Kurang optimal peran Pemdes tentang dokumentasi asset & batas desa
Jumlah Desa yg memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan (Desa/Kelurahan)		Indikator Kinerja Utama	Data potensi & prioritas kebutuhan desa	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes & Masyarakat	MoU antara Perguruan Tinggi dengan Pemkab. Jember



Aspek Kajian / Indikator	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Angka Indeks Desa Membangun (Desa)	226	Indikator Kinerja Utama	Keterbatasan Sumber Daya	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Koordinasi & sinergitas lintas sektor
-Sangat tertinggal	1				
-Tertinggal	48				
-Berkembang	114				
-Maju	60				
-Mandiri	5				
Persentase perangkat Desa yang mempunyai sertifikat kompetensi (%)	0	Indikator Kinerja Utama	Kualitas SDM di Desa	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Dinamika Pemerintahan Desa yang dinamis
Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPMD/K	248 kelompok	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan LPMD/K	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Kurang optimalnya peran LPMD/K & memobilisasi & menumbuhkan partisipasi masyarakat
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	280 kelompok	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan TP-PKK Kab, Kec, Ds/Kel.	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes & Masyarakat	Kurang optimalnya peran PKK Desa/Kelurahan memobilisasi masyarakat
Prosentase LPM D/K Berprestasi	0,80%	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan kelembagaan LPMD/K	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes & Masyarakat	Kurang optimalnya peran Pemdesa / Kelurahan
Prosentase PKK Aktif	100%	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan kelembagaan TP-PKK Kab, Kec. Ds/Kel.	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemdes & Masyarakat	Tidak ada kendala & hambatan yang berarti.
Prosentase Posyandu Aktif	100%	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan kelembagaan Sektap Pokjanal	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemdes & Masyarakat	Tidak ada kendala & hambatan yang berarti.
Prosentase Partisipasi & Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	2%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Tingkat partisipasi masyarakat & tokoh masyarakat	Kurang optimalnya peran monitoring, evaluasi & pendataan
Prosentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes.	Kurang optimalnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan pasca program

Aspek Kajian / Indikator	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Prosentase Penggunaan Tehnologi Tepat Guna di Pedesaan	12,5%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi pembinaan kegiatan &	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov & tingkat partisipasi masyarakat	Kurang memahami pentingnya TTG bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Prosentase Lembaga Ekonomi Pedesaan	5,31%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi pembinaan kegiatan &	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov & tingkat partisipasi masyarakat	Masih belum optimal & kurang pahamnya Pemerintah Desa untuk menggali potensi SDA & SDM di pedesaan

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021, bahwa Visi Pembangunan daerah adalah "**Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri**", sedangkan Misi Pembangunan adalah **1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ; 2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Berkeadilan ; 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menjabarkan arahan Perubahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah..

Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (by name & by address). Database Peduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan dalam pelayanan OPD.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan. Hal tersebut memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di

tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Pengembangan teknologi yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan pelayanan OPD khususnya pada perwujudan program yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu mereduksi rumah tangga miskin di Kabupaten Jember, melalui tiga strategi mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan kelembagaan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota**

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : (1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; (2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat; (3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat; (4) Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG, adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah keterbatasan database utamanya terkait dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, perubahan dinamika pemerintahan desa saat Pilihan Kepala Desa atau Pergantian Antar Waktu Kepala Desa akan berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban di masing-masing Desa. Munculnya regulasi tentang desa yang diinisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi tersebut, menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk menyiapkan kapasitas masyarakat, kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa, Pemerintahan Desa termasuk didalamnya Badan Perwakilan Desa agar mampu menjalankan amanah regulasi dimaksud. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya masyarakat miskin, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa dan kelurahan, serta kemauan pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong dalam mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar-belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi dan lain sebagainya yang akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan antar daerah, sektor, dan masyarakat serta pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang diperlukan arahan kebijakan pembangunan daerah dalam konteks dimensi ruang.

Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dll) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya.

Selama kurun waktu Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan program/kegiatan penataan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sehingga dapat dicapai tertatanya 12 Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Jember Kota dan Kecamatan Kota.

RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015 sampai dengan 2035, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah melalui sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Timur. Secara teknis dan substantif, RTRW Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, dengan suatu mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan dengan pendekatan Sistim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata

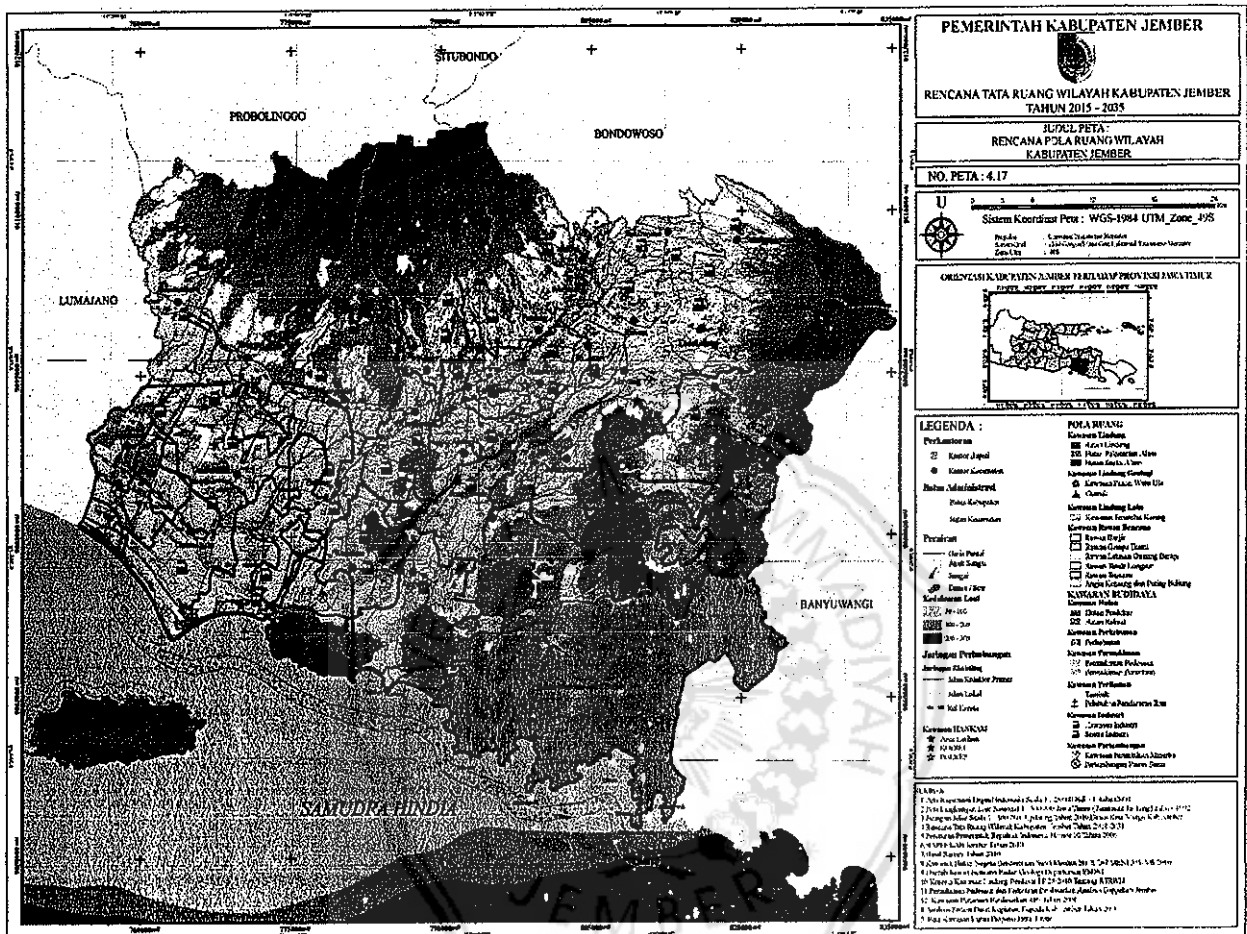
Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang

produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

## PETA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER



Pelaksanaan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih menitikberatkan pada Program Umum Perwujudan Pola Ruang Wilayah khususnya kawasan budidaya pada permukiman dan peruntukan lainnya, yang diantaranya meliputi : 1. Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dan 2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan pengembangan kantor pemerintahan di pedesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan,

rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021 dan berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih mengedepankan pendekatan Isu-Isu Kesejahteraan Rakyat yang memerlukan perhatian dan penanganan prioritas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan, permasalahan kemiskinan, kesejahteraan perempuan dan anak, dan disparitas pembangunan antara wilayah.

Tabel.3.2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021  
Isu Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Profil	Pengertian Program	Ramuan Mitigasi/Adaptasi/Jan/atau Alternatif	Rekomendasi
1	Perbaikan gizi masyarakat	Meningkatkan kesehatan & mengurangi angka kesakitan	Peningkatan pelayanan penjamin gizi tingkat dasar	Pengenalan kehidupan sehat pada tingkat rumah tangga (melalui posyandu)
2	Pengembangan lingkungan sehat	Meningkatkan kesehatan & mengurangi angka kesakitan	Pengembangan lingkungan sehat berbasis partisipasi masyarakat	Pengenalan kehidupan sehat pada tingkat rumah tangga
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan rumah sehat	Memenuhi kebutuhan papan & menghindari fenomena bermukim kumuh pada kawasan terlarang	Pengembangan perumahan vertikal pada kawasan tepat untuk terbangun maupun rehabilitasi rumah layak huni	Mengembangkan sistem rusun yang nyaman & berkualitas di daerah perkotaan, sedangkan pedesaan melalui perbaikan rumah kurang layak huni bagi masyarakat miskin.



No	Program Prioritas	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/ Adaptasi/ dan / atau Alternatif	Rekomendasi
1	2	3	4	5
4	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan	Meningkatkan kapasitas masyarakat	Pemberdayaan lembaga kesejahteraan masyarakat	Inventarisasi kegiatan lembaga sosial & melibatkan partisipasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sekitar.
5	Pemberdayaan & peningkatan partisipasi masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa	Pemberdayaan & peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi lokal	Pemberdayaan berbasis potensi & ekonomi lokal.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### 3.5.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPD dan renstra K/LSKPD Kab./Kota, serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Bapemas Provinsi Jawa Timur telah diawali dengan antara lain dapat dilakukan dengan cara forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh unsur bidang, Bapemas Kab./Kota dengan narasumber dari unsur Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan, walaupun Jawa Timur telah melampaui target dengan penduduk miskin 15,5 % pada tahun 2015, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC), Ekonomi hijau atau green economy, Global Warming dan Potensi krisis ekonomi dunia. Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistik, jumlah penduduk miskin nasional per september 2013 adalah sebesar 28.553.930 atau 11,47% sedangkan di Jatim jumlah penduduk miskin sebesar 12,73 % (4.865.820). Implementasi Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Jawa Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Semakin terbukanya hubungan antar negara, pasar bebas, AEC menjadi pendorong Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, selengkapnya isu strategis sebagaimana Tabel 3.2. Selanjutnya terhadap isu strategis dimaksud ditentukan kriteria penentuan isu strategis dan dilakukan pembobotan sampai dengan diperoleh hasil skoring isu strategis sesuai dengan prioritasnya

Tabel 3.3  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal
1	2	3	4
1	Target SDGs dalam Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin di Kab. Jember terbesar di Prov. Jawa Timur	Penduduk miskin Jember 277.390 (PPLS 2014)
2	Era Globalisasi / Pasar Bebas	Semakin terbukanya hubungan antar negara	Jember menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3	ASEAN Economic Community (AEC)	Instabilitas harga komoditi	Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa / kel merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disnergikan satu dengan yang lain.
4	Ekonomi Hijau / Green Economy	Implementasi UU No. 8 Th. 2014 tentang Desa	Partisipasi dan swadaya masyarakat pedesaan
5	Global Warming	Pengarusutamaan gender	Pelanggaran etika & kekerasan dalam rumah tangga
6	Potensi krisis ekonomi dunia	Bencana alam	Tingkat pengangguran meningkat
7	Krisis Energi Dunia	Kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik	Kelangkaan stok BBM memicu krisis sosial

Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut, isu strategis yang memiliki terkait dengan kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin dan target SDGs. Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kelurahan merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

### 3.5.2 Penentuan Isu-Isu Pembangunan di Kabupaten Jember

Hasil telaah analisis gambaran isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lebih menitikberatkan pada kurang siapnya masyarakat desa, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi informasi yang telah berkembang pesat, sehingga ketertinggalan masih menjadi kunci utama dalam memajukan pembangunan masyarakat pedesaan. Identifikasi isu-isu pembangunan pedesaan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

#### Isu-Isu Pembangunan di Kabupaten Jember Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Isu-Isu Pembangunan
1	Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa masih belum memadai
2	Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah
3	Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergis dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan
4	Penyiapan kelembagaan desa untuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum dilaksanakan

No	Isu-Isu Pembangunan
5	Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa
6	Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi Desa
7	Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
8	Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi
9	Tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang belum merata, sehingga masih terdapatnya status desa sangat tertinggal dan tertinggal berdasarkan angka indeks desa membangun
10	Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal

Memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember seperti tersebut pada tabel diatas sangat diperlukan peran nyata dan kerja keras semua stake holder mulai dari masyarakat pedesaan, lembaga kemasyarakatan di desa, pemerintahan desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk saling percaya, saling membutuhkan dan saling mendukung secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dan haknya.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Jember melalui penyelenggaraan tugas, fungsi dan tata kerja OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Bupati Jember yang tertuang pada RPJMD 2016-2021 adalah "**Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri**", sedangkan Misi Pembangunan adalah **1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ; 2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Berkeadilan ; 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.**

OPD harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Bupati kedalam program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek-aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan, baik dalam skala daerah, nasional, regional maupun internasional.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan untuk menentukan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember selama lima tahun kedepan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah "**Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa**".

Adapun sasaran strategis yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN						KONDISI KINERJA AKHIR (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase desa maju dan mandiri	28,7%	28,7 %	30,9 %	36,7 %	40,7 %	44,6 %	46,9 %	46,9%

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat di pedesaan (people centered development), yaitu pengembangan kemampuan sosial (social capabilities) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola aset (assets management), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah:

- (1) Meningkatkan landasan pembangunan desa dengan beban pertanggungjawaban pada seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang didalamnya meliputi ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam dokumen lampiran ( Lampiran Tabel 4.2 hal. 58)

Implementasi strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Perubahan Renstra 2016–2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, kebijakan tersebut meliputi

1. Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM;
3. SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tertuang pada Misi 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan tujuan **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik**” dengan Indikator Kinerja Utama : **Indeks Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam tujuan memperkuat kelembagaan Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat dan Bersih**

**Tabel 4.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI</b>			
<b>MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1.Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	1.Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	1. Meningkatkan landasan pembangunan desa dengan beban pertanggungjawaban pada seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang didalamnya meliputi	1. Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM;

<b>VISI : JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI</b>			
<b>MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.	3. SK Dirjen PPMD No 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.





## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1 Pengantar**

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, berisi program-program dan kegiatan prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun untuk pemenuhan layanan minimal OPD dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Sekaligus penyajian indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam rangka perencanaan program dan kegiatan yang dapat terukur. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan selama 5 (lima) tahun mulai 2016 s/d 2021. Program-program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam penyusunan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada tujuan dan sasaran pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagaimana terlampir pada Lampiran 5.1.

### **5.2 Rencana Program dan Kegiatan OPD**

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan, selengkapny matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perubahan Renstra OPD untuk kegiatan Rutin dalam rangka kelancaran pelayanan kebutuhan dasar operasional kantor, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kerja, peningkatan disiplin aparatur maupun laporan akuntabilitas pemerintah daerah tertuang sebagaimana terlampir pada Lampiran 5.2.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

#### 6.1 Pengantar

Indikator kinerja sangat diperlukan untuk mengukur secara kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan, apa bukti keberhasilannya dan seberapa banyak keberhasilan yang telah dicapai. Pengukuran indikator kinerja menjadi kata kunci apakah program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus atau bertahap dan bahkan dapat tidak dilanjutkan manakala hasil evaluasi dirasa target telah tercapai. Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

**TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 - 2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>1</b>	<b>Penataan Desa</b>									
22.9	Persentase Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (%)	14,51	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	40,00	Dipemasdes
22.14	Jumlah Desa yang terkoneksi internet	0	0	50	50	50	50	26	226	Dipemasdes
<b>2</b>	<b>Kerjasama Desa</b>									
22.2	Jumlah Kerjasama Antar Desa (Lembaga)	26	26	26	26	26	26	26	26	Dipemasdes
<b>3</b>	<b>Administrasi Pemerintahan Desa</b>									
22.10	Jumlah Desa yang memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan (Desa/Kelurahan)	0	0	50	50	50	50	26	226	Dipemasdes

22.11	Angka Indeks Desa Membangun (Desa)									Dipemasdes
	a. Sangat Tertinggal	1	1	0	0	0	0	0	0	
	b. Tertinggal	48	48	37	27	16	6	0	0	
	c. Berkembang	114	114	115	116	118	119	120	120	
	d. Maju	60	60	64	68	72	76	81	81	
	e. Mandiri	5	5	10	15	20	25	25	25	
22.12	Prosentase Desa Maju dan Mandiri (%)	28,76	28,76	32,74	36,72	40,70	44,69	48,90	46,90	Dipemasdes
22.13	Persentase perangkat Desa yang mempunyai sertifikat kompetensi (%)	0	0	80	85	90	95	100	100	Dipemasdes
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat									
22.1	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK) (Kelompok)	248	260	275	300	330	380	430	430	Dipemasdes
22.2	Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	280	280	280	280	280	280	280	280	Dipemasdes
22.3	Persentase LPM Berprestasi (%)	0,80	2,41	4,03	5,64	7,25	8,87	10,48	10,48	Dipemasdes
22.4	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Dipemasdes
22.5	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Dipemasdes
22.6	Jumlah Desa yang sudah membentuk BUMDesa (Desa)	12	22	57	97	137	177	226	226	Dipemasdes
22.7	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	2	2	2	3	3	4	4	4	Dipemasdes
22.8	Persentase Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Dipemasdes
22.9	Persentase Penerapan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan (%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	75	Dipemasdes
22.10	Honor yang diterima RT dan RW berdasarkan kriteria partisipasi dalam program pembangunan (Rp.)	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Dipemasdes
22.11	Jumlah Pasar Tradisional Desa (Pasar)	14	-	15	15	15	15	15	75	Dipemasdes

## 6.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang *inheren* disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan pada strategi terpilih sebagaimana bab terdahulu, maka pada bab ini disajikan Indikator Kinerja Outcome dari Program Prioritas yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 s/d 2021 Kabupaten Jember sebagaimana tabel berikut.

**Tabel. 6.2 Indikator Outcome dan Program Prioritas yang Sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Misi : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik									
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), dan bersih ( <i>clean government</i> ), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih									
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR 2021	PD
1	Janji Kerja 18	Honor yang diterima RT dan RW berdasarkan kriteria partisipasi dalam program pembangunan	Identifikasi RT dan RW by name by address	Menyediakan perangkat penilaian atas RT dan RW yang berpartisipasi dalam pembangunan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penyusunan Pedoman Desa	-	100%	DPMD
						Jumlah desa yang sudah membentuk BUMDesa	-	226 BUMDesa	
						Jumlah desa yang menerima perbup	-	226 Desa	
						Persentase data desa yang tersusun	-	90%	

Misi : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

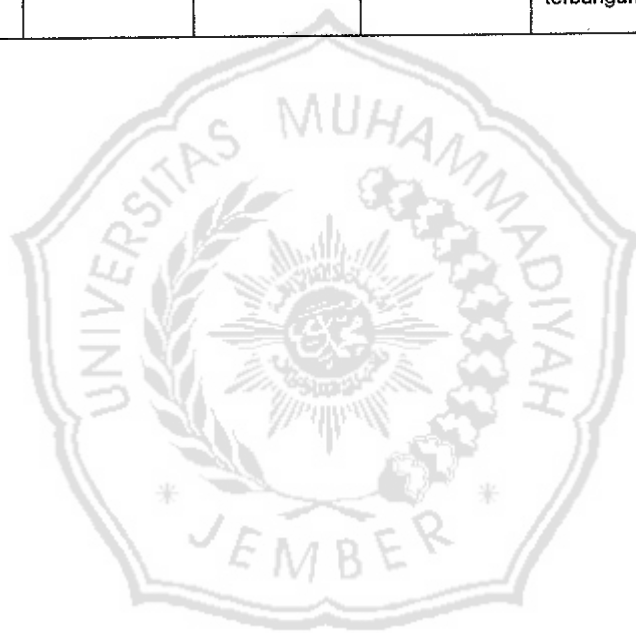
Tujuan 2 : Memperkuat kelembagaan Desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat dan Bersih

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR 2021	PD
2	Meningkatkan Sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat Desa untuk penguatan kelembagaan masyarakat Desa Janji Kerja 17	Jumlah Desa yang memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan	Pendampingan perguruan tinggi melalui gerakan satu desa satu dosen dalam rangka mempercepat penguatan kelembagaan masyarakat desa	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam melakukan pendampingan satu desa satu dosen	Program Pendampingan Desa melalui Kerja Sama Perguruan Tinggi	Persentase Desa/Kelurahan yg memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yg dibutuhkan	0%	100%	DPMD
					Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi pembangunan wilayah kecamatan	0 %	100 %	
						Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ APBDes sesuai Pedum	0%	100%	
		Persentase perangkat Desa/kelurahan yang mempunyai sertifikat kompetensi	Peningkatan kemampuan bendahara desa dalam aspek keuangan Desa	Melakukan pelatihan terhadap bendahara desa tentang penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0	226 Desa	
	Peningkatan kemampuan operator Desa dalam pengelolaan website Desa	Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada operator desa id untuk mengisi dan mendesain konten website desa	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kemampuan pelatihan internet dan bimtek dalam kegiatan pelatihan	0 %	90%			
3	Meningkatkan akselerasi pelaksanaan kelembagaan Desa sesuai dengan Undang-undang Desa/Perda/Perbup Janji Kerja 17	Angka Indeks Desa Membangun	Pengembangan dan penguatan kelembagaan desa dan ketahanan masyarakat desa menuju desa Maju dan Mandiri	Melakukan pembinaan, inisiasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, kemandirian ekonomi desa, Sosial dan Budaya masyarakat desa	Program Pengembangan Desa Maju dan Mandiri (P2DM2)	Angka Indeks Desa Membangun	1 sangat tertinggal 46 Desa tertinggal 114 Desa Berkembang 60 Desa Maju 5 Desa Mandiri	0 sangat tertinggal 0 Desa tertinggal 120 Desa Berkembang 60 Desa Maju 5 Desa Mandiri	

**Misi III : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agribisnis/Agro-Indusit dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan**

**Tujuan 1 : Meningkatkan pendapatan para pedagang dan UMKM serta Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR 2021	PD
4	Meningkatnya omset dan aset UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi serta Pengembangan Ekonomi Perdesaan (BUMDesa) Janji Kerja 9	Jumlah Desa yang sudah membentuk BUMDesa	Penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan melalui Pengembangan BUMDesa	Membentuk BUMDesa sebagai pilar utama menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan	Program Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan (P4)	Jumlah pasar tradisional desa yg terbangun	14 pasar desa	75 pasar desa	DPMD
						Persentase Sarpras yg terbangun	2,86%	15,04 %	



## BAB VII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun (2016 - 2021).

Perubahan Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUKTAHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
2018**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak lupa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 alhamdulillah akhirnya dapat kami laksanakan dan disusun dengan baik.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai dasar dan suatu konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja (*frame work*) pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dimana dalam penentuannya dibutuhkan suatu perangkat indikator yang terukur sehingga diperlukan SOP Pemutakhiran. Pemutakhiran ini akan menjadi kegiatan secara sistematis.

Semoga dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 dapat menjadi instrumen yang penting yang mampu memotret tingkat perkembangan desa berdasarkan amanah Undang-Undang Desa serta dapat menjadi arah panduan bagi penetapan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Jakarta, Feb 2018

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA,**



**Dr. H. MUKLIS, M.Si**

# DAFTAR ISI

## BAB I

1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1

## BAB II

2.1 Metode Perhitungan.....	2
2.1.1 Sumber Data .....	2
2.1.2 Teknik Perhitungan.....	2
2.2 Metode Perhitungan.....	3
2.3 Teknik Analisis .....	3

## BAB III

3.1 Pengorganisasian Pemutakhiran Status Perkembangan .....	4
3.2 Rincian Tugas.....	4
3.3 Rincian Pelaksana.....	6

## LAMPIRAN I

Indeks Ketahanan Sosial .....	7
Indeks Ketahanan Ekonomi .....	11
Indeks Ketahanan Lingkungan.....	12

## LAMPIRAN II

Kuesioner Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun.....	14
--	----

## LAMPIRAN III

Berita Acara Penetapan Status Desa beserta Rekapitulasi IDM Tahun 2017	
Format Berita Acara Tingkat Desa .....	26
Format Berita Acara Tingkat Kecamatan .....	28
Format Berita Acara Tingkat Kabupaten.....	31
Format Berita Acara Tingkat Provinsi.....	34

# **BAB I**

## **1.1. GAMBARAN UMUM**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017,
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

## BAB II

### 2.1. METODE PERHITUNGAN

#### 2.1.1. SUMBER DATA

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa dengan harapan mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa.

#### 2.1.2. TEKNIK PERHITUNGAN

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

$$I_x = \frac{\sum_1^n \text{Skor } X}{n_x \times 5}$$

$I_x$  = indeks

n = jumlah indikator

Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut

$$\text{Indeks}_{\text{Lingkungan}} = \frac{4+5+3}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$

Penghitungan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Scoring masing-masing item instrument dapat dilihat pada lampiran I

## 2.2. PENENTUAN STATUS IDM

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$

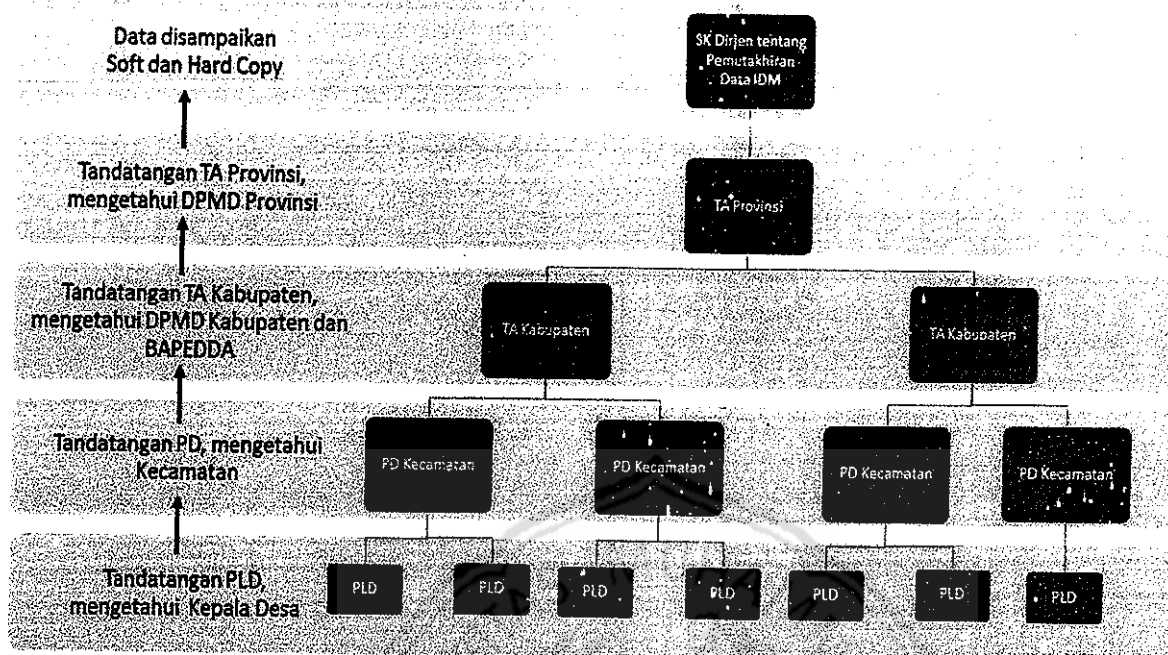
Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

## 2. 3. TEKNIK ANALISIS

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

## BAB III

### 3.1 PENGORGANISASIAN PEMUTAKHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA



Tabel 1. Skema Pemutakhiran Data IDM

Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa ini melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

### 3.2 RINCIAN TUGAS

3.2.1 Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) melakukan pengisian kuisisioner di masing – masing Desa dampingan secara benar dan sesuai fakta data di lapangan;

3.2.2 Tugas Kepala Desa melakukan tandatangan sebagai verifikasi kuisisioner yang telah diisi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) kemudian disampaikan kembali kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk disampaikan kepada Pendamping Desa (PD) Kecamatan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;

- 3.2.3 Tugas Pendamping Desa (PD) Kecamatan mengkoordinir dan membantu Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melakukan pengisian kuisisioner, merekap hasil status desa secara *softcopy* dan *hardcopy*, selanjutnya membawa kuisisioner untuk diverifikasi oleh Kecamatan;
- 3.2.4 Tugas Kecamatan melakukan tandatangan sebagai verifikator kuisisioner yang telah di verifikasi oleh Camat, kemudian disampaikan kembali kepada Pendamping Desa (PD) Kecamatan untuk disampaikan kepada Tenaga Ahli (TA) Kabupaten disertai dengan rekap data status desa tingkat Kecamatan;
- 3.2.5 Tugas Tenaga Ahli (TA) Kabupaten mengontrol Pendamping Desa (PD) Kecamatan dalam mengkoordinir dan membantu Pendamping Lokal Desa (PLD), serta merekap hasil status desa pada tingkat kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, selanjutnya membawa kuisisioner untuk diverifikasi oleh DPMD Kabupaten dan BAPPEDA Kabupaten;
- 3.2.6 Tugas DPMD Kabupaten dan BAPPEDA Kabupaten melakukan tandatangan sebagai verifikasi kuisisioner yang telah di verifikasi oleh Kecamatan, kemudian disampaikan kembali kepada Tenaga Ahli (TA) Kabupaten untuk disampaikan kepada Tenaga Ahli (TA) Provinsi disertai dengan rekap status desa tingkat Kabupaten;
- 3.2.7 Tugas Tenaga Ahli (TA) Provinsi bertanggungjawab melakukan monitoring Tenaga Ahli (TA) Kabupaten dalam mengontrol Pendamping Desa (PD) Kecamatan, merekap data status desa di tingkat Provinsi dan menyerahkan hasil dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, selanjutnya membawa kuisisioner untuk diverifikasi oleh DPMD Provinsi dan Bappeda Provinsi;
- 3.2.8 Tugas DPMD Provinsi dan Bappeda Provinsi melakukan tandatangan sebagai verifikator kuisisioner, kemudian disampaikan kembali kepada Tenaga Ahli (TA) Provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk *softcopy* disertai rekap status desa tingkat Provinsi;
- 3.2.9 Tenaga Ahli (TA) Provinsi menyampaikan *softcopy* kuisisioner melalui email: [pemutakhiran.idm2017@gmail.com](mailto:pemutakhiran.idm2017@gmail.com) dengan *subject* (kode provinsi) (nama provinsi) contoh: 11 ACEH, sedangkan *hardcopy* yang sudah diverifikasi oleh DPMD Provinsi dan Bappeda Provinsi disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta, Indonesia.

### 3.3 RINCIAN PELAKSANAAN

Pemutakhiran Data Status Perkembangan Desa dilakukan selama 2 (dua) bulan mulai bulan Maret sampai bulan April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PETUGAS</b>
1.	Workshop Pemutakhiran Status Perkembangan Desa	12 – 13 Maret 2018	Datin Ditjen PPMD
2.	Penyebaran Kuisisioner	16 Maret – 21 Maret 2018	TA Provinsi
3.	Pengisian Kuisisioner	22 Maret – 31 Maret 2018	PLD
4.	Verifikasi Kepala Desa	01 April – 04 April 2018	PLD/ Kades
5.	Verifikasi Kecamatan	05 April – 09 April 2018	PD/ Camat
6.	Verifikasi Kabupaten	10 April – 13 April 2018	TA Kab/ DPMD/ Bappeda Kab
8.	Verifikasi Provinsi	14 April – 18 April 2018	TA Prov/ DPMD/ Bappeda Prov
9.	Penyerahan Kuisisioner	19 April – 23 April 2018	TA Prov
10.	Pemutakhiran Pusat	24 April – 30 April 2018	Tim Datin PPMD
11.	Launching IDM	01 Mei 2018	Ditjen PPMD





## LAMPIRAN I

Setiap indikator diberikan skor antara 0 sampai dengan 5. Skor yang semakin tinggi mencerminkan tingkat keberartian pada setiap indikator. Berikut ini merupakan rincian prosedur pemberian skor dari setiap indikator.

<b>IDM terdiri dari</b> IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan	$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$
<b>INDIKATOR</b>	<b>SKORING</b>
<b>Indeks Ketahanan Sosial</b>	$IKS = \frac{\sum \text{Skor indikator}}{175}$
Skor Akses Sarana Kesehatan	Jika waktu waktu tempuh (menit) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 30 maka skor 5</li> <li>• 31 – 60 maka skor 4</li> <li>• 61 – 90 maka skor 3</li> <li>• 91 – 120 maka skor 2</li> <li>• &gt;120 maka skor 1</li> </ul>
Skor Dokter	Jika jumlah dokter <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 1 maka skor 5</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>
Skor Bidan	Jika jumlah bidan <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 1 maka skor 5</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor Tenaga Kesehatan Lain	Jika jumlah tenaga kesehatan lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 5 maka skor 5</li> <li>• 3 – 4 maka skor 4</li> <li>• 2 maka skor 3</li> <li>• 1 maka skor 2</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>
Skor tingkat kepesertaan BPJS	$\text{Jika hasil } \frac{\text{Jumlah penduduk peserta BPJS}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;0,75 maka skor 5</li> <li>• 0,6 – 0,75 maka skor 4</li> <li>• 0,26 – 0,5 maka skor 3</li> <li>• 0,1 – 0,25 maka skor 2</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>

Skor akses terhadap Poskesdes	<p>Jika jarak tempuh menuju poskesdes (meter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 500</math> maka skor 5</li> <li>• 501 – 1000 maka skor 4</li> <li>• 1001 – 2000 maka skor 3</li> <li>• 2001 – 3500 maka skor 2</li> <li>• <math>&gt;3500</math> maka skor 1</li> </ul>
Skor aktivitas posyandu	<p>Jika hasil <i>Jumlah posyandu aktif 1 bulan sekali</i> / <i>Jumlah Posyandu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>&gt;0,75</math> maka skor 5</li> <li>• 0,6 – 0,75 maka skor 4</li> <li>• 0,26 – 0,5 maka skor 3</li> <li>• 0,1 – 0,25 maka skor 2</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor akses terhadap SD/MI	<p>Bila jarak tempuh menuju SD/MI (meter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 3000</math> maka skor 5</li> <li>• 3000,01 – 6000 maka skor 4</li> <li>• 6000,01 – 8000 maka skor 3</li> <li>• 8000,01 – 10000 maka skor 2</li> <li>• <math>&gt; 10000</math> maka skor 1</li> </ul>
Skor akses terhadap SMP/MTS	<p>Bila jarak tempuh menuju SMP/MTS (meter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 6000</math> maka skor 5</li> <li>• 6000,01 – 8000 maka skor 4</li> <li>• 8000,01 – 10000 maka skor 3</li> <li>• 10000,01 – 11999,99 maka skor 2</li> <li>• <math>\geq 12000</math> maka skor 1</li> </ul>
Skor akses terhadap SMU/SMK	<p>Bila jarak tempuh menuju SMU/SMK (meter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 6000</math> maka skor 5</li> <li>• 6.000,01 – 8000 maka skor 4</li> <li>• 8.000,01 – 10000 maka skor 3</li> <li>• 10.000,01 – 11999,99 maka skor 2</li> <li>• <math>\geq 12.000</math> maka skor 1</li> </ul>
Skor Ketersediaan PAUD	<p>Jika jumlah PAUD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 1</math> maka skor 5</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor ketersediaan PKBM/Paket ABC	<p>Jika jumlah PKBM/ Paket ABC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 1</math> maka skor 5</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor akses terhadap pusat keterampilan/ kursus	<p>Jika jumlah pusat keterampilan/ kursus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 1</math> maka skor 5</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>

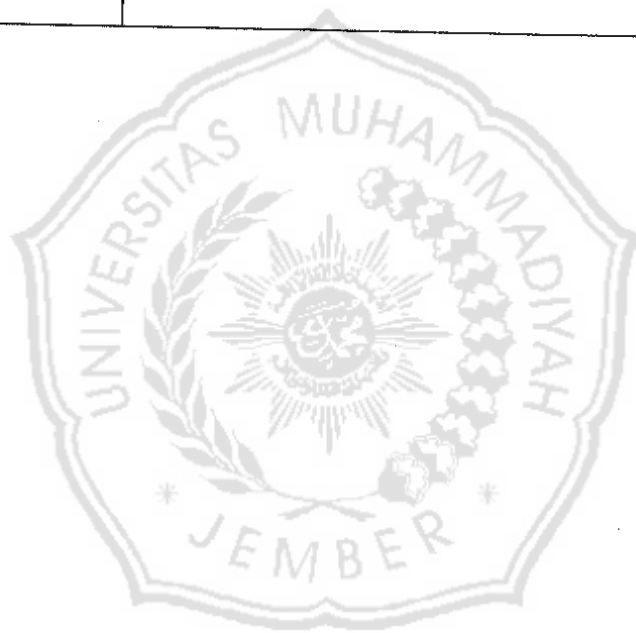
Skor ketersediaan taman bacaan masyarakat/ perpustakaan Desa	<p>Jika taman bacaan masyarakat/ perpustakaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia maka skor 5</li> <li>• tidak tersedia maka skor 1</li> </ul>
Skor kebiasaan gotong royong	<p>Jika kebiasaan gotong royong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat maka skor 5</li> <li>• tidak terdapat maka skor 1</li> </ul>
Skor Frekuensi Gotong Royong	<p>Jika Frekuensi Gotong Royong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 2 maka skor 5</li> <li>• 0 – 2 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor keberadaan ruang publik	<p>Jika ruang publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat maka skor 5</li> <li>• tidak terdapat maka skor 1</li> </ul>
Skor kelompok kegiatan olahraga	<p>Jika jumlah kelompok kegiatan olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 7 maka skor 5</li> <li>• 6 – 7 maka skor 4</li> <li>• 4 – 5 maka skor 3</li> <li>• 2 – 3 maka skor 2</li> <li>• 1 maka skor 1</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>
Skor Kegiatan Olahraga	<p>Jika jumlah kegiatan olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 7 maka skor 5</li> <li>• 6 – 7 maka skor 4</li> <li>• 4 – 5 maka skor 3</li> <li>• 2 – 3 maka skor 2</li> <li>• 1 maka skor 1</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>
Skor Keragaman Agama	<p>Jika jumlah jenis agama di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;1 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 1</li> </ul>
Skor Keragaman Bahasa	<p>Jika jumlah bahasa yang digunakan sehari-hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;1 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 1</li> </ul>
Skor Keragaman Komunikasi	<p>Jika warga Desa terdiri dari suku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;1 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 1</li> </ul>
Skor Pos Keamanan	<p>Jika Pos Keamanan di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat maka skor 5</li> <li>• Tidak terdapat maka skor 1</li> </ul>

Skor Siskamling	<p>Jika sistem keamanan lingkungan warga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat maka skor 5</li> <li>• Tidak terdapat maka skor 1</li> </ul>
Skor Konflik	<p>Jika konflik di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat maka skor 5</li> <li>• Terdapat maka skor 1</li> </ul>
Skor PMKS	<p>Jika jumlah PMKS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 4</li> <li>• 2 maka skor 3</li> <li>• &gt; 2 maka skor 2</li> </ul>
Skor Akses SLB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 maka skor 5</li> <li>• 1 – 3 maka skor 4</li> <li>• 4 – 5 maka skor 3</li> <li>• 6 maka skor 2</li> <li>• &gt; 6 maka skor 1</li> </ul>
Skor Akses Listrik	<p>Jika = <math>\frac{\text{Jumlah Keluarga Memakai Listrik} + \text{Nonlistrik}}{\text{Jumlah Keluarga Memakai Listrik}}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 0,9</math> maka skor 5</li> <li>• 0,8 – 0,89 maka skor 4</li> <li>• 0,6 – 0,79 maka skor 3</li> <li>• 0,5 – 0,59 maka skor 2</li> <li>• &lt; 0,5 maka skor 1</li> </ul>
Skor sinyal	<p>Jika sinyal telepon seluler di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuat maka skor 5</li> <li>• Lemah maka skor 3</li> <li>• Tidak ada maka skor 0</li> </ul>
Skor internet	<p>Jika fasilitas internet di kantor Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat maka skor 5</li> <li>• Tidak terdapat maka skor 1</li> </ul>
Skor akses internet warga	<p>Jika akses internet warga di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat maka skor 5</li> <li>• Tidak terdapat maka skor 1</li> </ul>
Skor Akses Jamban	<p>Jika warga Desa BAB di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jamban sendiri maka skor 5</li> <li>• Jamban bersama maka skor 4</li> <li>• Jamban umum maka skor 3</li> <li>• Lainnya maka skor 0</li> </ul>
Skor Sampah	<p>Jika warga Desa membuang sampah di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat sampah kemudian diangkut, maka skor 5</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam lubang atau dibakar, maka skor 4</li> <li>• Sungai/ saluran irigasi, danau, laut, got, selokan, maka skor 1</li> <li>• Lainnya maka skor 0</li> </ul>
Skor air minum	<p>Jika sumber air minum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5</li> <li>• Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4</li> <li>• Kemasan, mata air, maka skor 3</li> <li>• Sungai, air hujan, maka skor 2</li> <li>• Lainnya maka skor 1</li> </ul>
Skor Air Mandi & Cuci	<p>Jika sumber air mandi dan cuci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5</li> <li>• Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4</li> <li>• mata air, maka skor 3</li> <li>• Sungai, air hujan, maka skor 2</li> <li>• Lainnya maka skor 1</li> </ul>
<b>Indeks Ketahanan Ekonomi</b>	<p><b>IKE = <math>\frac{\sum \text{Skor Indikator}}{60}</math></b></p>
Skor Keragaman Produksi	<p><i>Jumlah industri mikro</i></p> <p>Jika <math>\frac{\text{Total KK}}{\text{Jumlah industri mikro}}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 0,004</math> maka skor 5</li> <li>• <math>0,001 - 0,003</math> maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor Pertokoan	<p>Jika jarak ke kelompok pertokoan terdekat (km)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 7</math> maka skor 5</li> <li>• 8 – 12 maka skor 4</li> <li>• 13 – 17 maka skor 3</li> <li>• 18 – 25 maka skor 2</li> <li>• <math>&gt; 25</math> maka skor 1</li> </ul>
Skor Pasar	<p>Jika <math>\frac{\text{Total KK}}{\text{Jumlah Pasar}}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 250</math> maka skor 5</li> <li>• <math>&lt; 250</math> maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor Toko & Warung Kelontong	<p>Jika jumlah toko dan warung kelontong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>&gt;3</math> maka skor 5</li> <li>• 3 maka skor 4</li> <li>• 2 maka skor 3</li> <li>• 1 maka skor 2</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor kedai & penginapan	<p>Jika jumlah kedai dan penginapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>&gt; 1</math> maka skor 5</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>
Skor Pos & Jasa Logistik	<p>Jika jumlah pos dan jasa logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 1 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>
Skor Bank & BPR	<p>Jika jumlah Bank dan BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 1 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor Fasilitas Kredit	<p>Jika jumlah fasilitas kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 maka skor 5</li> <li>• 3 maka skor 4</li> <li>• 2 maka skor 3</li> <li>• 1 maka skor 2</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor Lembaga Ekonomi	<p>Jika Jumlah koperasi aktif dan Bumdesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 1 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 1</li> </ul>
Skor Moda Transportasi Umum	<p>Jika transportasi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada dengan trayek tetap maka skor 5</li> <li>• Ada tanpa trayek tetap maka skor 3</li> <li>• Tidak ada maka skor 1</li> </ul>
Skor Keterbukaan Wilayah	<p>Jika jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepanjang tahun maka skor 5</li> <li>• Sepanjang tahun kecuali saat tertentu maka skor 3</li> <li>• Tidak dapat dilalui sepanjang tahun maka skor 1</li> </ul>
Skor Kualitas Jalan	<p>Jika jenis permukaan jalan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspal/beton maka skor 5</li> <li>• Diperkeras (kerikil, batu, All) maka skor 4</li> <li>• Tanak maka skor 3</li> <li>• Lainnya maka skor 1</li> </ul>
<b>Indeks Ketahanan Lingkungan</b>	$IKL = \frac{\sum \text{Skor indikator}}{15}$
Skor Kualitas Lingkungan	<p>Pencemaran (air, udara, tanah, limbah di sungai) di Desa Jika <math>\frac{\text{jumlah Pencemaran}}{4}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 maka skor 5</li> <li>• 0,25 maka skor 4</li> <li>• 0,5 maka skor 3</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75 maka skor 2</li> <li>• 1 maka skor 0</li> </ul>
Skor Rawan Bencana	<p>Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) Jika jumlah jenis bencana di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 maka skor 5</li> <li>• 1 maka skor 4</li> <li>• 2 maka skor 3</li> <li>• 3 maka skor 0</li> </ul>
Skor Tanggap Bencana	<p>Fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) Jika jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 maka skor 5</li> <li>• 2 maka skor 4</li> <li>• 1 maka skor 3</li> <li>• 0 maka skor 0</li> </ul>



**KUESIONER PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Selamat pagi/ siang/ sore. Saat ini kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten..... Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan akan membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang lebih baik.

Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dalam pengumpulan data ini. Jawaban yang lengkap dan jujur akan sangat membantu. Informasi yang Bapak/Ibu berikan kami rahasiakan.

Mohon Bapak/Ibu **menandatangani pernyataan** di bawah ini serta **dibubuhkan cap Desa**.

**SEBELUM MENGISI KUESIONER INI, HARAP MEMBACA PANDUAN PENGISIAN KUESIONER TERLEBIH DAHULU SECARA SEKSAMA.**

Dengan ini saya bersedia mengikuti Pemutakhiran Informasi ini dan bersedia menjawab/mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dibawah ini.

Kepala Desa,  
  
(.....)

Demikian kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

**IP. Identitas Petugas**

IP1	Nama Petugas	
IP2	Tanggal	
IP3	No. Telepon Rumah / Hp	

Tanda Tangan Petugas

Materai 6.000

(.....)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Identitas Desa				Koding (Diisi petugas)
101	Nama Informan			
102	Jabatan			
103	No. Telepon Rumah / Hp			
104	Tanggal Lahir	Tanggal	Bulan	Tahun
105	Jenis kelamin	1. laki-laki 2. perempuan		
106	Nama Provinsi			
107	Nama Kabupaten			
108	Nama Kecamatan			
109	Nama Desa			
110	Titik Koordinat Desa	Lintang:	Bujur:	
111	Alamat Lengkap			
112	a. Nama Kepala Desa			
	b. Jenis Kelamin	1. laki-laki 2. perempuan		
113	No. Telepon Rumah / HP Kepala Desa			
114	No. Telepon Kantor Desa			
115	Email Desa			
116	Pendidikan terakhir Kepala Desa :	1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat 5. Tidak Sekolah		[ ]
117	Lama menjabat sebagai Kepala Desa ..... tahun. (bila Kepala Desa kurang dari 1 tahun menjabat, diisi angka 0 (nol))			
118	Apakah terdapat aparatur pemerintahan Desa sebagai berikut:			
	Aparatur	Jumlah Laki-laki	Koding	Jumlah Perempuan
	a. Sekretaris Desa	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	b. Kepala urusan tata usaha dan umum	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	c. Kepala urusan keuangan	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	d. Kepala urusan perencanaan	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	e. Kepala seksi pemerintahan	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	f. Kepala seksi kesejahteraan	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	g. Kepala seksi pelayanan	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	h. Staf petugas Desa	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	i. BPD dan Anggota	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	j. LPM dan Anggota	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	k. TP. PKK Desa	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	l. Kepala Dusun	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	m. Ketua RW/LK	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
	n. Ketua RT	orang	[ ] [ ] [ ]	orang
<b>Data Geografi, Topografi, dan Demografi</b>				
<b>DATA GEOGRAFI</b>				
	Luas Wilayah			Diisi petugas
001	Total Luas Wilayah Desa	km <sup>2</sup>	(1 km <sup>2</sup> = 100 Hektar)	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
002	Hutan Desa	km <sup>2</sup>	(1 km <sup>2</sup> = 100 Hektar)	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
<b>DATA TOPOGRAFI</b>				
003	Jenis Wilayah Desa	1. Dataran rendah	2. Dataran tinggi / pegunungan	3. Kepulauan
				[ ]
<b>DATA DEMOGRAFI</b>				
<b>Penduduk</b>				
004	Jumlah Total Penduduk		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
005	Jumlah Penduduk Laki-laki		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
006	Jumlah Penduduk Perempuan		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
007	Jumlah Penduduk Pendetang		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
008	Jumlah Penduduk yang Pergi		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
<b>Kepala Keluarga</b>				
009	Jumlah Total Kepala Keluarga		KK	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
010	Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan		KK	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
011	Jumlah Keluarga Miskin		KK	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
012	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia			
	a. <1 tahun		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
	b. 1-4 tahun		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
	c. 5-14 tahun		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
	d. 15-39 tahun		jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--

	e. 40-64 tahun	jiwa			[ ] [ ] [ ] [ ]
	f. 65 tahun ke atas	jiwa			[ ] [ ] [ ] [ ]
213	Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	Laki-laki	Koding	Perempuan	Koding
	a. Petani	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	b. Nelayan	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	c. Buruh Tani/ Nelayan	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	d. Buruh Pabrik	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	e. PNS	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	f. Pegawai Swasta	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	g. Wiraswasta/ pedagang	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
	h. Lainnya, sebutkan _____	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ] [ ]
214	<b>Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus</b>				
	Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus (contoh: tunanetra, tunarungu, tunawicara, dll. <b>Tidak termasuk gila atau penyakit jiwa lainnya</b> )	Laki-laki	Koding	Perempuan	Koding
		_____ jiwa	[ ] [ ] [ ]	_____ jiwa	[ ] [ ] [ ]



NO.	III. DIMENSI SOSIAL		Dijisi Petugas
	<b>KESEHATAN</b>		
	<b>Ketersediaan sarana kesehatan</b>		
301	a. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa? ( <i>Jawaban hanya 1</i> )	1. Rumah Sakit Umum 2. Rumah Sakit Ibu dan Anak 3. Rumah Bersalin 4. Puskesmas 5. Pustus 6. Poskesdes 7. Polindes 8. Tempat Praktik Dokter 9. Klinik Dokter	[ ]
	b. Berapa meter jarak ke sarana kesehatan terdekat? ( <i>sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a</i> )	_____ meter	[ ][ ][ ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat ( <i>sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a</i> )?	_____ menit	[ ][ ][ ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan bidan</b>		
302	a. Apakah terdapat bidan Desa (BDD)?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Jika ya, berapa jumlah bidan Desa?	_____ orang	[ ][ ][ ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan dokter</b>		
303	a. Apakah terdapat dokter yang praktik di Desa?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Jika ya, berapa orang dokter yang praktik di Desa?	_____ orang	[ ][ ][ ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya</b>		
304	a. Apakah terdapat tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan yang praktik di Desa?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Berapa orang tenaga kesehatan lainnya, selain dokter dan bidan di Desa?	_____ orang	[ ][ ][ ]
	<b>Akses ke Poskesdes/ Polindes dan Posyandu</b>		
305	a. Apakah tersedia sarana Poskesdes/ Polindes di Desa?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Berapa meter jarak ke Poskesdes/ Polindes terdekat?	_____ meter	[ ][ ][ ][ ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke Poskesdes/ Polindes terdekat?	_____ menit	[ ][ ][ ][ ]
	d. Apakah Poskesdes/ Polindes di Desa masih berfungsi/ aktif?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	e. Apakah terdapat rumah singgah / rumah tunggu untuk ibu hamil yang akan melahirkan?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
306	a. Berapa jumlah posyandu yang terdapat di desa?	_____ unit	[ ][ ]
	b. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan setiap sebulan sekali dalam setahun terakhir?	_____ unit	[ ][ ]
	c. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih dalam setahun terakhir?	_____ unit	[ ][ ]
	d. Apakah mayoritas warga Desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	e. Sumber pembiayaan kegiatan Posyandu di Desa	1. Iuran bulanan masyarakat 2. APBDes 3. Iuran bulanan masyarakat dan APBDes 4. Lainnya	[ ][ ]
	<b>Tingkat Kepesertaan BPJS</b>		
307	a. Berapa jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan / JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)?	_____ orang	[ ][ ][ ][ ]
	b. Apakah warga desa memanfaatkan pelayanan BPJS?	1. Ya, Sebagian besar 2. Ya, sebagian kecil 3. Tidak	[ ][ ]
	c. Berapa jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah?	_____ orang	[ ][ ][ ][ ]
	<b>Derajat Kesehatan dan Gizi Buruk</b>		
308	a. Apakah terdapat kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun 2017?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun 2017?	_____ kasus	[ ][ ][ ]
309	a. Apakah terdapat kejadian kematian balita di Desa selama tahun 2017?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian balita di Desa selama tahun 2017?	_____ kasus	[ ][ ][ ]
310	a. Apakah terdapat kejadian kematian bayi di Desa selama tahun 2017?	1. Ya      0. Tidak	[ ][ ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian bayi di Desa selama tahun 2017?	_____ kasus	[ ][ ][ ]

311	a. Apakah terdapat kejadian balita gizi buruk di Desa selama tahun 2017?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian balita gizi buruk di Desa selama tahun 2017?	_____ kasus		[ ][ ]
312	a. Apakah terdapat kejadian luar biasa penyakit di Desa selama tahun 2017?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Kejadian luar biasa penyakit apa yang terjadi di Desa selama tahun 2017?	Penyakit _____		
<b>PENDIDIKAN</b>				
<b>Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah</b>				
313	a. Berapa jumlah SD/MI (negeri/swasta) di Desa?	_____ unit		[ ][ ]
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SD/MI (negeri/swasta) di Desa?	_____ orang		[ ][ ][ ]
	c. Berapa meter jarak ke SD / MI (negeri / swasta) terdekat?	_____ meter		[ ][ ][ ]
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat?	_____ menit		[ ][ ][ ]
314	a. Berapa jumlah SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa?	_____ unit		[ ][ ]
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa?	_____ orang		[ ][ ][ ]
	c. Berapa meter jarak ke SMP / MTs (negeri / swasta) terdekat?	_____ meter		[ ][ ][ ]
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat?	_____ menit		[ ][ ][ ]
315	a. Berapa jumlah SMU / MA / SMK (negeri/swasta) di Desa?	_____ unit		[ ][ ]
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMU / MA / SMK (negeri/swasta) di Desa?	_____ orang		[ ][ ][ ]
	c. Berapa meter jarak ke SMU / MA / SMK (negeri / swasta) terdekat?	_____ meter		[ ][ ][ ]
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SMU / MA / SMK terdekat?	_____ menit		[ ][ ][ ]
<b>Data Tingkat Pendidikan</b>				
316	Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa	1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat		[ ]
317	a. Apakah di Desa terdapat anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa jumlah anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017	_____ anak		[ ][ ][ ]
318	a. Apakah di Desa terdapat anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa jumlah anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2017	_____ anak		[ ][ ][ ]
<b>Akses ke Pendidikan Non-Formal</b>				
319	a. Apakah terdapat Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa jumlah Pos PAUD yang beroperasi di Desa?	_____ unit		[ ][ ]
	c. Berapa meter jarak Pos PAUD terdekat?	_____ meter		[ ][ ][ ]
	d. Berapa jumlah guru PAUD di Desa?	_____ orang		[ ][ ][ ]
320	Apakah terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B, dan C selama satu tahun terakhir di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
321	a. Berapa jumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus di desa?	_____ unit		[ ][ ]
	b. Berapa jarak tempuh menuju pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus terdekat di Desa atau di luar Desa?	_____ meter		[ ][ ][ ]
<b>Akses Pengetahuan</b>				
322	a. Apakah terdapat fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat yang beroperasi? (jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "323")	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Apakah penduduk Desa memanfaatkan fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
<b>MODAL SOSIAL</b>				
323	a. Apakah terdapat kebiasaan gotong royong warga di Desa? (jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "324")	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa kali kegiatan gotong royong warga di Desa dilaksanakan dalam setahun?	_____ kali / tahun		[ ][ ][ ]
324	Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga untuk bersantai / bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka, taman, alun-alun, dll)?	1. Ya	0. Tidak	[ ]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

325	Apakah terdapat perkumpulan / organisasi sosial di desa, seperti: <i>(setiap pertanyaan 325.a-325.k harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>						
	Perkumpulan/ Organisasi Sosial	Ketersediaan		Koding	Frekuensi kegiatan pertahun		
	a. Karang taruna	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	b. PKK	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	c. Perkumpulan agama (majelis taklim, kebaktian, dan sejenisnya)	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	d. Pantu asuhan	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	e. Kelompok arisan	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	f. Kelompok/organisasi/lembaga tani	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	g. Kelompok/organisasi/lembaga nelayan	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	h. Kelompok/organisasi/lembaga Usaha ternak	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	i. Kelompok/organisasi/lembaga pengrajin	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	j. Kelompok/organisasi/lembaga khusus wanita	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
	k. Lainnya, sebutkan: _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]	_____ kali /tahun	[ ][ ]	
326	a. Apakah sebagian besar warga Desa mengikuti musyawarah Desa? <i>(jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "327")</i>				1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa kali musyawarah Desa diselenggarakan dalam satu tahun terakhir?				_____ kali	[ ][ ]	
	c. Apakah terdapat kelompok perempuan yang mengikuti musyawarah Desa?				1. Ya	0. Tidak	[ ]
327	a. Berapa jumlah fasilitas / lapangan olah raga di Desa?				_____ unit	[ ][ ]	
	b. Apakah terdapat kegiatan kelompok olahraga di Desa yang rutin dilakukan, seperti latihan rutin dan pertandingan olahraga?				1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. Berapa jumlah kelompok kegiatan olah raga di Desa?				_____ kelompok	[ ][ ]	
328	Apakah warga Desa terdiri dari lebih dari satu suku atau etnis?				1. Ya	0. Tidak	[ ]
329	Apakah warga Desa sehari-hari berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa?				1. Ya	0. Tidak	[ ]
330	Apakah terdapat warga di Desa yang menganut agama di bawah ini : <i>(setiap pertanyaan 330.a – 330.g harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>						
	a. Islam	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	b. Kristen	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	c. Katolik	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	d. Buddha	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	e. Hindu	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	f. Konghucu	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	g. Lainnya, sebutkan: _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
331	Apakah terdapat tempat ibadah: <i>(setiap pertanyaan A331.a – A331.f harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>						
	a. Masjid/ Musholla/ Langgar	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	b. Gereja Kristen	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	c. Gereja Katolik	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	d. Wihara	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	e. Pura	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
	f. Litang/ Kelenteng	1. Ya	0. Tidak	[ ]			
332	Apa agama / kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar / mayoritas warga Desa?				1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Buddha 5. Hindu 6. Konghucu 7. Lainnya, sebutkan _____	[ ]	
333	a. Adakah kelompok seni adat dan budaya di Desa? <i>(bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 334)</i>				1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Bila ada, berapa kali kegiatan seni adat dan budaya diselenggarakan dalam setahun terakhir?				_____ kali	[ ][ ]	

	c. Berapa jumlah kelompok kegiatan seni adat dan budaya di Desa?	_____ kelompok		[ ] [ ]
334	Apakah mayoritas warga di Desa menghadiri perayaan adat budaya tertentu, seperti : (setiap pertanyaan 334.a – 334.d harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Kelahiran	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Kematian	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. Perkawinan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	d. Lainnya, sebutkan _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	<b>Keamanan Warga</b>			
335	Apakah terdapat warga di Desa yang melakukan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
336	Apakah terdapat warga di Desa yang berinisiatif dan berpartisipasi dalam pengaktifan sistem keamanan lingkungan?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
337	a. Apakah terdapat konflik di Desa selama setahun terakhir? (bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 339)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Jika ada, sebutkan jenis konflik dan jumlah kejadian dalam setahun terakhir.	Jumlah Kejadian		
	b1. Antarkelompok masyarakat	_____ kasus		[ ]
	b2. Kelompok masyarakat antarDesa	_____ kasus		[ ]
	b3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	_____ kasus		[ ]
	b4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	_____ kasus		[ ]
	b5. Antarpelajar/mahasiswa/pemuda	_____ kasus		[ ]
	b6. Antarsuku	_____ kasus		[ ]
	b7. Antaragama	_____ kasus		[ ]
	b8. Lainnya, sebutkan:	_____ kasus		[ ]
338	a. Apakah sebagian besar konflik yang terjadi di Desa dapat diselesaikan dengan damai?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Jika ya, siapa yang berperan menjadi mediator / penengah upaya dalam penyelesaian konflik?			
	b1. Aparat keamanan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b2. Aparat pemerintah	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b3. Tokoh masyarakat	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b4. Tokoh agama	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b5. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b6. Tidak ada	1. Ya	0. Tidak	[ ]
339	Apakah terdapat penyelesaian konflik di desa oleh lembaga lokal sesuai adat budaya tertentu (misalnya diadakan ritual upacara dll) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
340	a. Apakah terdapat tindak kejahatan sebagai berikut yang terjadi di Desa selama setahun terakhir?			
	a1. Pencurian	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a2. Penipuan/ penggelapan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a3. Penganiayaan/ kekerasan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a4. Pembakaran	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a5. Perkosaan/ kejahatan terhadap susilaan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a6. Penyalahgunaan/ peredaran narkoba	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a7. Perjudian	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a8. Pembunuhan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	a9. Perdagangan orang (human trafficking)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di Desa, tindak kejahatan mana yang paling sering terjadi di Desa?	_____		[ ]
	<b>Kesejahteraan Sosial</b>			
341	a. Apakah terdapat SLB (Sekolah Luar Biasa) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Jika ada, berapa jumlah SLB yang terdapat di Desa?	_____ unit		[ ]
	c. Berapa jarak tempuh menuju SLB terdekat?	_____ km		[ ] [ ] [ ]

342	Apakah terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai berikut : <b>(setiap pertanyaan 342.a – 342.j harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</b>		
	a. Anak jalanan	1. Ya	0. Tidak [ ]
	b. Anak terlantar	1. Ya	0. Tidak [ ]
	c. Korban kekerasan	1. Ya	0. Tidak [ ]
	d. Lanjut usia terlantar (panti jompo)	1. Ya	0. Tidak [ ]
	e. Korban penyalahgunaan NAPZA	1. Ya	0. Tidak [ ]
	f. Pekerja migran terlantar	1. Ya	0. Tidak [ ]
	g. Gelandangan / pengemis	1. Ya	0. Tidak [ ]
	h. PSK (Pekerja Seks Komersial)	1. Ya	0. Tidak [ ]
343	Berapa jumlah kejadian bunuh diri di Desa?	_____ orang [ ]	
<b>PERMUKIMAN</b>			
<b>Akses Air Bersih dan Air Minum</b>			
344	Sumber air untuk minum yang digunakan oleh warga di Desa <b>(setiap pertanyaan 344.a – 344.i harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</b>		
	a. Air kemasan	1. Ya	0. Tidak [ ]
	b. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	1. Ya	0. Tidak [ ]
	c. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	0. Tidak [ ]
	d. Sumur bor / pompa	1. Ya	0. Tidak [ ]
	e. Sumur	1. Ya	0. Tidak [ ]
	f. Mata air	1. Ya	0. Tidak [ ]
	g. Sungai / danau / kolam	1. Ya	0. Tidak [ ]
	h. Air hujan	1. Ya	0. Tidak [ ]
	i. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak [ ]
345	Bagaimana cara warga desa memperoleh air minum?	1. Gratis	0. Membeli [ ]
346	Sumber air untuk mandi / cuci yang digunakan oleh warga di Desa <b>(setiap pertanyaan 346.a – 346.h harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</b>		
	a. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	1. Ya	0. Tidak [ ]
	b. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	0. Tidak [ ]
	c. Sumur bor / pompa	1. Ya	0. Tidak [ ]
	d. Sumur	1. Ya	0. Tidak [ ]
	e. Mata air	1. Ya	0. Tidak [ ]
	f. Sungai / danau / kolam	1. Ya	0. Tidak [ ]
	g. Air hujan	1. Ya	0. Tidak [ ]
	h. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak [ ]
<b>Akses Sanitasi</b>			
347	Di manakah sebagian besar warga di Desa BAB (Buang Air Besar)? <b>(jawaban hanya satu pilihan)</b>	1. Jamban sendiri 2. Jamban bersama 3. Jamban Umum 4. Bukan jamban	[ ]
348	Di manakah sebagian besar warga di Desa membuang sampah? <b>(jawaban hanya satu pilihan)</b>	1. Tempat sampah kemudian diangkat 2. Dalam lubang atau dibakar 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut 4. Drainase (got/selokan) 5. Lainnya, sebutkan	[ ]
349	Apakah terdapat TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara)?	1. Ya	0. Tidak [ ]
350	Di manakah tempat / saluran warga membuang limbah cair rumah tangga / air kotor di Desa? <b>(jawaban hanya satu pilihan)</b>	1. Lubang resapan (lubang tanah yang tertutup) 2. Drainase (got/selokan) 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut	[ ]

		4. lubang tanah yang terbuka 5. Lainnya, sebutkan		
	<b>Akses Listrik</b>			
351	a. Berapa jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN?	_____ keluarga		[ ] [ ]
	b. Berapa jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari non-PLN (Diesel/ generator, swasta, swadaya, perseorangan)?	_____ keluarga		[ ]
352	Berapa jumlah keluarga di Desa yang belum teraliri listrik sama sekali?	_____ keluarga		[ ]
353	Apakah terdapat sumber energi terbarukan (tenaga angin, air, surya/matahari, dll) di desa yang dimanfaatkan warga desa sebagai sumber listrik di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	<b>Akses Informasi &amp; Komunikasi</b>			
354	Bagaimana sinyal telepon seluler / <i>handphone</i> di Desa?	1. Sinyal Kuat	2. Sinyal lemah	0. Tidak ada sinyal
355	Operator / provider telepon seluler apa yang sinyalnya dapat diterima di desa?			
	a. Telkomsel (Simpati, Kartu AS, Kartu Halo)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Indosat (IM3, Matrix, Mentari)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. XL	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	d. Lainnya, sebutkan : _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]
356	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran TVRI Nasional / TVRI Daerah?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
357	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran swasta?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
358	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran luar negeri?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
359	Apakah terdapat fasilitas internet di kantor kepala Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
360	Apakah penduduk Desa memiliki akses internet?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
361	Apakah Desa memiliki sarana informasi sebagai berikut			
	a. Papan Informasi Desa	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Website	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. Lainnya, sebutkan _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	<b>IV. DIMENSI EKONOMI</b>			
	<b>Keragaman Produksi Masyarakat Desa</b>			
401	Apa sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Desa? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	1. Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan) 2. Industri 3. Perdagangan, transportasi, dan jasa 4. Pariwisata 5. Lainnya, sebutkan		[ ]
402	Apakah terdapat produk unggulan di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
403	Apakah produk komoditi hasil pertanian di Desa mengalami perubahan dibanding setahun yang lalu?	1.Ya, terdapat peningkatan 0.Ya, terdapat penurunan		[ ]
404	a. Apakah terdapat produksi hasil tangkapan laut di Desa? ( <i>bila jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "405"</i> )	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Jika ya, Apakah terdapat perubahan produksi hasil tangkapan laut di Desa dibanding setahun yang lalu?	1Ya, terdapat peningkatan 0.Ya, terdapat penurunan		[ ]
405	a. Berapa jumlah industri mikro dan kecil di Desa?	_____ unit		[ ] [ ]
	b. Berapa jumlah industri menengah di Desa?	_____ unit		[ ] [ ]
	<b>Akses ke Pusat Perdagangan</b>			
406	a. Apakah terdapat kelompok pertokoan di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa km jarak ke kelompok pertokoan terdekat?	_____ km		[ ]
407	Berapa jumlah pasar dengan bangunan permanen?	_____ unit		[ ]
408	Berapa jumlah pasar dengan bangunan semi permanen?	_____ unit		[ ]
409	a. Apakah terdapat pasar tanpa bangunan di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa jumlah pasar tanpa bangunan di Desa?	_____ unit		[ ]
410	Berapa jumlah toko / warung kelontong di Desa?	_____ unit		[ ]



411	Apakah terdapat warung / kedai makanan dan minuman di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
412	a. Apakah terdapat hotel atau penginapan (hostel, motel, losmen, wisma) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa meter jarak ke hotel atau penginapan terdekat?	_____ meter		[ ][ ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke hotel atau penginapan terdekat?	_____ menit		[ ][ ]
	<b>Akses Distribusi / Logistik</b>	<b>Ketersediaan</b>		<b>Koding</b>
				<b>Jarak terdekat</b>
				<b>Koding</b>
413	Apakah terdapat kantor pos / pos pembantu / rumah pos / pos keliling di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
				_____ meter
414	Apakah terdapat pelayanan jasa ekspedisi swasta (pengiriman barang) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
				_____ meter
	<b>Akses Lembaga Keuangan</b>			
415	Apakah terdapat bank umum pemerintah (BRI, BNI, BPD, BTN, dll) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
				_____ meter
416	Apakah terdapat bank swasta (Danamon, BCA, Niaga, dll) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
				_____ meter
417	Apakah tersedia BPR (Bank Perkreditan Rakyat) termasuk BPR Syariah di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
418	Apakah terdapat fasilitas kredit yang diterima warga Desa selama setahun terakhir berupa:			
	a. KUR (Kredit Usaha Rakyat)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. KUK (Kredit Usaha Kecil)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	d. Kredit lainnya, sebutkan : _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	<b>Ketersediaan Lembaga Ekonomi</b>			
419	Berapa jumlah koperasi di bawah ini yang masih aktif beroperasi?	_____ unit		[ ][ ]
420	a. Apakah terdapat BUMDesa di desa? ( <i>bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 421</i> )	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Jika ya, apa jenis / bidang usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tersebut? ( <i>setiap pertanyaan harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak"</i> )			
	b1. Pelayanan umum	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b2. Jasa Penyewaan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b3. Broker / usaha perantara	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b4. Perdagangan, pabrik, atau trading	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b5. Usaha bersama / holding	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b6. Bisnis keuangan atau finansial	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	<b>Keterbukaan Wilayah</b>			
421	Apakah di Desa terdapat angkutan umum? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	1. Ada, dengan trayek tetap 2. Ada, tanpa trayek tetap 3. Tidak ada angkutan umum		[ ]
422	Apakah angkutan umum yang utama di Desa beroperasi setiap hari?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
423	Kapan jam operasional angkutan umum yang utama?	1. Siang & malam hari	0. Hanya siang hari	[ ]
424	Apakah jalan di Desa dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	1. Sepanjang tahun 2. Sepanjang tahun kecuali saat tertentu 3. Tidak dapat dilalui sepanjang tahun		[ ]
425	Apa jenis permukaan jalan di Desa yang terluas? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	1. Aspal/ beton 2. Diperkeras (kerkil, batu, dll) 3. Tanah 4. Lainnya, sebutkan _____		[ ]
426	Bagaimana kualitas permukaan jalan di Desa?	1. Baik 2. Rusak Sedang 3. Rusak Parah		[ ]
	<b>V. DIMENSI EKOLOGI</b>			
	<b>Kondisi Lingkungan</b>			
501	Apakah sumber air tersedia sepanjang tahun?	1. Ya sepanjang tahun		[ ]

		2. Ya, kecuali saat tertentu seperti musim kemarau atau kondisi lainnya		
		3. Tidak		
502	Apakah terjadi pencemaran lingkungan hidup di Desa selama setahun terakhir?			
	a. Pencemaran air	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Pencemaran tanah	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. Pencemaran udara	1. Ya	0. Tidak	[ ]
503	Apakah terdapat dampak yang dirasakan oleh warga Desa akibat pencemaran lingkungan?	1. Menyebabkan gangguan kesehatan ringan 2. Menimbulkan penyakit / infeksi 3. Menimbulkan kematian		[ ]
504	Apakah terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah pabrik/industri/usaha?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
505	Apakah terdapat perencanaan tata ruang desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
506	Apakah terdapat perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
<b>Potensi Bencana</b>				
507	Seberapa sering kejadian/bencana alam yang terjadi selama 3 tahun terakhir?			
	a. Tanah longsor	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	b. Banjir	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	c. Gempa bumi	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	d. Tsunami	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	e. Gelombang pasang laut	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	f. Angin puyuh / puting beliung / topan	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	g. Gunung meletus	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	h. Kebakaran hutan	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	i. Kekeringan lahan	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
	j. Lainnya, sebutkan	_____ kali/ tahun		[ ] [ ]
508	Apakah terdapat fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam di Desa?			
	a. Peringatan dini bencana alam	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Peringatan dini khusus tsunami	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	d. Jalur evakuasi	1. Ya	0. Tidak	[ ]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. AKTIVITAS DESA				
601	a. Apakah terdapat Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa jumlah pendamping lokal Desa di Kecamatan?	_____ orang		[ ][ ]
602	Apakah ada pelaku tingkat desa untuk memfasilitasi kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas, (termasuk KPMD, TPMD)?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
603	Berapa jumlah anggota KPMD (Kader Posyandu/Kader kesehatan) yang aktif	_____ orang		[ ][ ]
604	Berapa jumlah anggota TPMD yang aktif	_____ orang		[ ][ ]
605	Apakah ada kebun gizi di Desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
606	Sebutkan sumber pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat di desa			
	1.			
	2.			
	3.			
607	Apakah terdapat Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tentang Kesehatan dan Pendidikan?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
VII. SUMBER PENDAPATAN DESA				
		2016		2017
701	a. Berapa total Dana Desa yang didapat tahun 2016 dan tahun 2017?	Rp _____	Rp _____	
	b. Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017			
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	b1. Sarana prasarana untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman	Rp _____	Rp _____	
	b2. Sarana prasarana kesehatan masyarakat	Rp _____	Rp _____	
	b3. Sarana prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan	Rp _____	Rp _____	
	b4. Sarana prasarana produksi dan distribusi	Rp _____	Rp _____	
	b5. Sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Rp _____	Rp _____	
	b6. Program kegiatan pembangunan Desa lainnya:	Rp _____	Rp _____	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
	b7. Peningkatan Investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Rp _____	Rp _____	
	b8. Dukungan kegiatan ekonomi	Rp _____	Rp _____	
	b9. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	Rp _____	Rp _____	
	b10. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	Rp _____	Rp _____	
	b11. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Rp _____	Rp _____	
	b12. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	Rp _____	Rp _____	
	b13. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Rp _____	Rp _____	
	b14. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya:	Rp _____	Rp _____	
702	Informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat melalui			
	a. papan informasi	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	b. musyawarah Desa	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	c. website	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	d. Lainnya, sebutkan _____	1. Ya	0. Tidak	[ ]
703	Sumber Pendapatan Desa	2016		2017
	a. Berapa sumber dana dari Pendapatan Asli Desa?	Rp _____	Rp _____	
	b. Berapa sumber dana dari Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota?	Rp _____	Rp _____	
	c. Berapa sumber dana dari Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota?	Rp _____	Rp _____	
	d. Berapa sumber dana dari bantuan dari APBD Kabupaten/Kota termasuk BOK dan DAK / DAU?	Rp _____	Rp _____	
	e. Berapa sumber dana dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga?	Rp _____	Rp _____	
	f. Berapa sumber dana dari pendapatan desa lain yang sah?	Rp _____	Rp _____	

\_\_\_\_\_Terimakasih atas partisipasi Anda\_\_\_\_\_

**KOP DESA**

**BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini,..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., bertempat di:

- 1. Desa :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kabupaten :
- 4. Provinsi :

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai berikut,

NO	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2017	IKE 2017	IKL 2017	NILAI IDM 2017	STATUS IDM 2017

Sehingga Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten..... ditetapkan dengan status .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

dibuat oleh,  
Pendamping Lokal Desa

(ttd Materai 6.000)

( )

( )

KOP DESA

BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di:

1. Desa : Adlan Jior
2. Kecamatan : Panyabungan
3. Kabupaten : Mandailing Natal
4. Provinsi : Sumatera Utara

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil sebagai berikut,

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2017	IKE 2017	IKL 2017	NILAI IDM 2017	STATUS IDM 2017
12	SUMATERA UTARA	12.13	MANDAILING NATAL	12.13.01	Panyabungan	12.13.01.2001	Adlan Jior	0.7890	0.6835	0.5333	0.6686	Berkembang

Sehingga Desa Adlan Jior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan dengan **STATUS BERKEMBANG**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

dibuat oleh,  
Pendamping Lokal Desa

(ttd Materai 6.000)

( )

( )

**KOP KECAMATAN**  
**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN STATUS DESA**

---

Pada hari ini,..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., bertempat di:

1. Kecamatan :
2. Kabupaten :
3. Provinsi :

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Camat

dibuat oleh,  
Pendamping Desa

(ttd Materai 6.000)

( )

( )

KOP KECAMATAN

BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di:

1. Kecamatan : Sunggal
2. Kabupaten : Deli Serdang
3. Provinsi : Sumatera Utara

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Camat

dibuat oleh,  
Pendamping Desa

(ttd Materai 6.000)

( )

( )

**REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017**

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2017	IKE 2017	IKL 2017	NILAI IDM 2017	STATUS IDM 2017
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2009	HELVETIA	0.7890	0.6835	0.5333	0.6686	Berkembang
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2002	KAMPUNG LALANG	0.8017	0.5570	0.6667	0.6751	Berkembang
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2010	MEDAN KRIO	0.8268	0.6582	0.6667	0.7172	Maju
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2005	MULJO REJO	0.8037	0.8228	0.6667	0.7644	Maju

Mengetahui,  
Camat

dibuat oleh,  
Pendamping Desa

(ttd Materai 6.000)

( ( ) )



**KOP DPMD KABUPATEN**

**BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini,..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., bertempat di:

- 1. Kabupaten :
- 2. Provinsi :

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

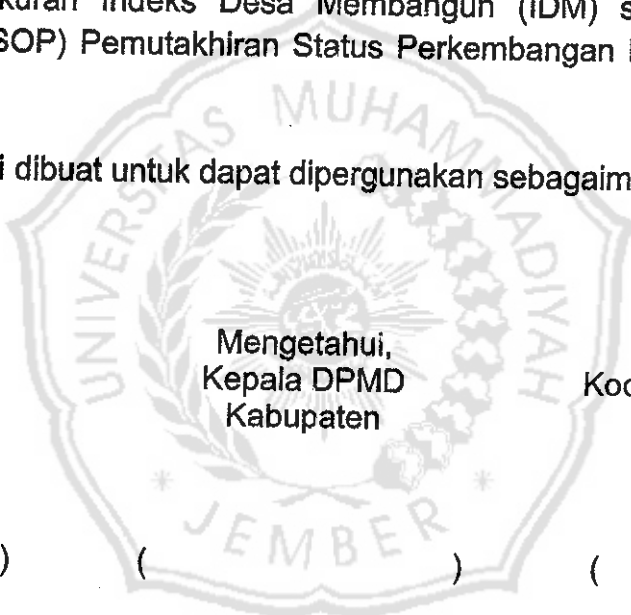
Mengetahui,  
Kepala Bappeda  
Kabupaten

Mengetahui,  
Kepala DPMD  
Kabupaten

Dibuat oleh,  
Koordinator Tenaga Ahli  
Kabupaten

(ttd Materal 6.000)

( ) ( ) ( )



KOP DPMD KABUPATEN

BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di:

1. Kabupaten : Deli Serdang
2. Provinsi : Sumatera Utara

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil sebagai berikut,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Bappeda  
Kabupaten

Mengetahui,  
Kepala DPMD  
Kabupaten

Dibuat oleh,  
Koordinator Tenaga Ahli  
Kabupaten

(ttid Materai 6.000)

( )

( JEMBER )

( )

## REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2017	IKE 2017	IKL 2017	NILAI IDM 2017	STATUS IDM 2017
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2009	HELVETIA	0.7890	0.6835	0.5333	0.6686	Berkembang
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2002	KAMPUNG LALANG	0.8017	0.5570	0.6667	0.6751	Berkembang
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.23	SUNGGAL	12.07.23.2010	MEDAN KRIO	0.8268	0.6582	0.6667	0.7172	Maju
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.01	GUNUNG MERIAH	12.07.01.2005	GUNUNG SINEMBAH	0.4919	0.4177	0.6667	0.5254	Tertinggal
12	SUMATERA UTARA	12.07	DELI SERDANG	12.07.01	GUNUNG MERIAH	12.07.01.2001	KUTA BAYU	0.4818	0.2532	0.6667	0.4672	Sangat Tertinggal

Mengetahui,  
Kepala Bappeda  
Kabupaten

Dibuat oleh,  
Koordinator Tenaga Ahli  
Kabupaten

(td Materai 6.000)

**KOP DPMD PROVINSI**  
**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini,..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di Provinsi.....

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai terlampir.

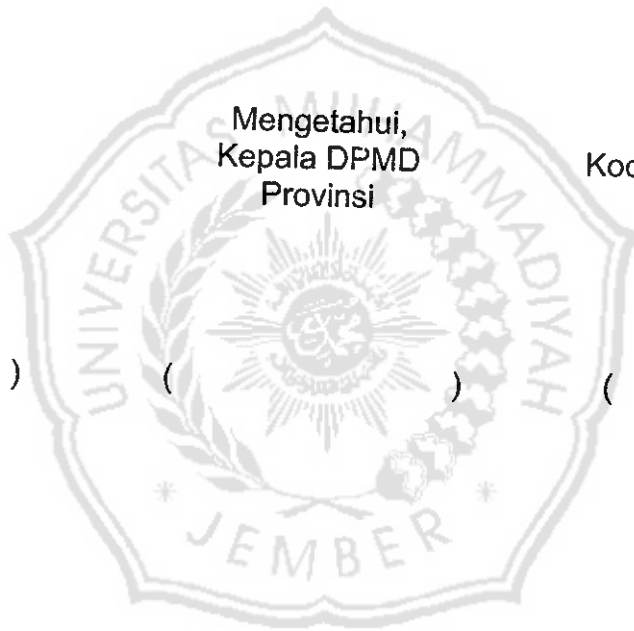
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Bappeda  
Provinsi

Mengetahui,  
Kepala DPMD  
Provinsi

Dibuat oleh,  
Koordinator Tenaga Ahli  
Provinsi

(ttd Materai 6.000)



( ) ( ) ( ) ( )

**KOP DPMD PROVINSI**

**BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua April Tahun 2018 bertempat di Provinsi Sumatera Utara

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM dengan hasil sebagai berikut,

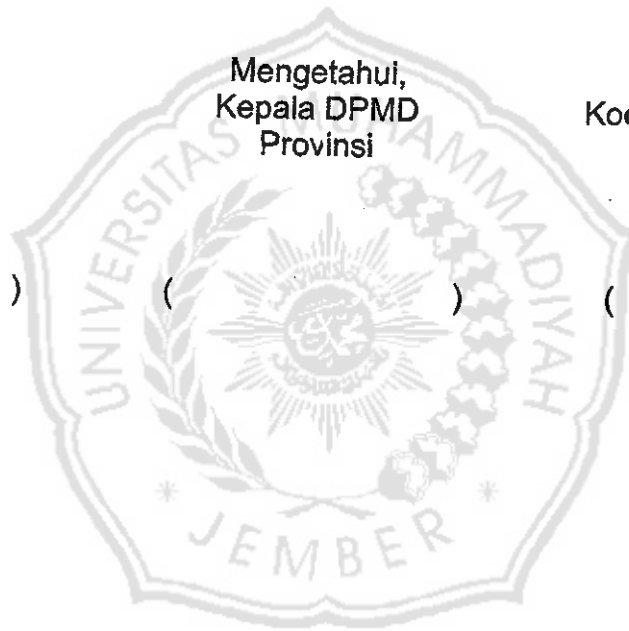
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Bappeda  
Provinsi

Mengetahui,  
Kepala DPMD  
Provinsi

Dibuat oleh,  
Koordinator Tenaga Ahli  
Provinsi

(ttd Materai 6.000)



## CONTOH REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2017

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2017	IKE 2017	IKL 2017	NILAI IDM 2017	STATUS IDM 2017
12	SUMATERA UTARA	12.13	MANDAILING NATAL	12.13.01	Panyabungan	12.13.01.2001	Adian Jior	0.7890	0.6835	0.5333	0.6686	Berkembang
12	SUMATERA UTARA	12.13	MANDAILING NATAL	12.13.02	Penyabungan Utara	12.13.02.2002	Kampung Lalang	0.8017	0.5570	0.6667	0.6751	Berkembang
12	SUMATERA UTARA	12.21	PADANG LAWAS	12.21.01	Sosopan	12.21.01.2001	Pagaran Bira Jae	0.8268	0.6582	0.6667	0.7172	Maju

Dibuat oleh,  
Koordinator TA Provinsi .....

(ttd Materai 6.000)

(Nama )

Mengetahui,

Kepala Dinas PMD Provinsi ..... : (ttd)

Kepala Bappeda Provinsi ..... : (ttd)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER  
DESA PUGER KULON  
Sekretariat : Jl. Mayor Adi Darmo 102 Kode Pos 68164

BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di:

1. Desa PUGER KULON
2. Kecamatan PUGER
3. Kabupaten JEMBER
4. Provinsi JAWA TIMUR

Telah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai berikut:

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KECAMA	NAMA KECAMA	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2018	IKE 2018	IKL 2018	NILAI IDM	STATUS IDM
35	JAWA TIMUR	35009	JEMBER	3500930	PUGER	35009303	PUGER KULON	0,84	0,8833	0,9333	0,88556	Mandiri

Sehingga Desa PUGER KULON, Kecamatan PUGER, Kabupaten Jember ditetapkan dengan status Mandiri

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NURHASAN

didata oleh,  
Sekretaris Desa

SAIFUL HOJI

ID DESA

3 5 0 0 9 3 0 3

**KUESIONER PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**TAHUN 2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Selamat pagi/ siang/ sore. Saat ini kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa .....Kecamatan .....Kabupaten..... Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan akan membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang lebih baik.

Kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu dalam pengumpulan data ini. Jawaban yang lengkap dan jujur akan sangat membantu. Informasi yang Bapak/Ibu berikan kami rahasiakan.

Mohon Bapak/Ibu menandatangani pernyataan di bawah ini serta dibubuhkan cap Desa.

**SEBELUM MENGISI KUESIONER INI, HARAP MEMBACA PANDUAN PENGISIAN KUESIONER TERLEBIH DAHULU SECARA SEKSAMA.**

Dengan ini saya bersedia mengikuti Pemutakhiran Informasi ini dan bersedia menjawab/mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dibawah ini.



Demikian kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

IP. Identitas Petugas		
IP1	Nama Petugas	Moh. Hendrik
IP2	Tanggal	19 Desember 2018
IP3	No. Telepon Rumah / Hp	081233029432

Tanda Tangan Petugas

  
 (Moh. Hendrik)



I. Identitas Desa			Koding (Diisi petugas)	
101	Nama Informan	SAIFUL HOJI		
102	Jabatan	SEKRETARI DESA		
103	No. Telepon Rumah / Hp	085321543189		
104	Tanggal Lahir	Tanggal 19 Bulan 03 Tahun 1985		
105	Jenis kelamin	1 laki-laki 2. perempuan	[1]	
106	Nama Provinsi	JAWA TIMUR	[3][5]	
107	Nama Kabupaten	JEMBER	[3][5][0][0][9]	
108	Nama Kecamatan	PUGER	[3][5][0][0][9][3][0]	
109	Nama Desa	PUGER KULON	[3][5][0][0][9][3][0][3]	
110	Titik Koordinat Desa	Lintang: 8°22'21,7" LS	Bujur: 113°28'9"	
111	Alamat Lengkap	Jl. ADI DARMO NO 102		
112	a. Nama Kepala Desa	NURHASAN		
	b. Jenis Kelamin	1 laki-laki 2. perempuan	[1]	
113	No. Telepon Rumah / HP Kepala Desa	08123482983		
114	No. Telepon Kantor Desa			
115	Email Desa	desa.puger.kulon@gmail.com		
116	Pendidikan terakhir Kepala Desa :	1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat 5. Tidak Sekolah	[2]	
117	Lama menjabat sebagai Kepala Desa ... tahun. (bila Kepala Desa kurang dari 1 tahun menjabat, diisi angka 0 (nol))		[0][5]	
118	Apakah terdapat aparatur pemerintahan Desa sebagai berikut:			
	Aparatur	Jumlah Laki-laki	Koding	Jumlah Perempuan
	a. Sekretaris Desa	1 orang	[0][1]	0 orang
	b. Kepala urusan tata usaha dan umum	1 orang	[0][1]	0 orang
	c. Kepala urusan keuangan	1 orang	[0][1]	0 orang
	d. Kepala urusan perencanaan	1 orang	[0][1]	0 orang
	e. Kepala seksi pemerintahan	1 orang	[0][1]	0 orang
	f. Kepala seksi kesejahteraan	1 orang	[0][1]	0 orang
	g. Kepala seksi pelayanan	1 orang	[0][1]	0 orang
	h. Staf petugas Desa	1 orang	[0][1]	1 orang
	i. BPD dan Anggota	9 orang	[0][9]	2 orang
	j. LPM dan Anggota	10 orang	[1][0]	1 orang
	k. TP, PKK Desa	0 orang	[0][0]	12 orang
	l. Kepala Dusun	5 orang	[0][5]	1 orang
	m. Ketua RW/LK	19 orang	[1][9]	1 orang
	n. Ketua RT	64 orang	[6][4]	4 orang
II. Data Geografi, Topografi, dan Demografi			Diisi petugas	
DATA GEOGRAFI				
	Luas Wilayah			
201	Total Luas Wilayah Desa	3.858 Hektar	km <sup>2</sup> (1 km <sup>2</sup> = 100 Hektar)	[0][3][8][5][8]
202	Hutan Desa	0 Hektar	km <sup>2</sup> (1 km <sup>2</sup> = 100 Hektar)	[0][0][0]
DATA TOPOGRAFI				
203	Jenis Wilayah Desa	1. Dataran rendah	2. Dataran tinggi / pegunungan	3. Kepulauan
				[1]
DATA DEMOGRAFI				
	Penduduk			
204	Jumlah Total Penduduk	16.631 jiwa		[1][6][6][3][1]
205	Jumlah Penduduk Laki-laki	8.468 jiwa		[0][8][4][6][8]
206	Jumlah Penduduk Perempuan	8.163 jiwa		[0][8][1][6][3]
207	Jumlah Penduduk Pdatang	53 jiwa		[0][0][5][3]
208	Jumlah Penduduk yang Pergi	174 jiwa		[0][1][7][4]
	Kepala Keluarga			
209	Jumlah Total Kepala Keluarga	4.668 KK		[4][6][6][8]
210	Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan	470 KK		[4][7][0]
211	Jumlah Keluarga Miskin	220 KK		[2][2][0]
212	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia			
	a. <1 tahun	50 jiwa		[0][5][0]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--

	b. 1-4 tahun	<u>453</u> jiwa		[4][5][3]	
	c. 5-14 tahun	<u>2.358</u> jiwa		[2][3][5][8]	8
	d. 15-39 tahun	<u>6.899</u> jiwa		[6][8][9][9]	
	e. 40-64 tahun	<u>6.155</u> jiwa		[6][1][5][5]	
	f. 65 tahun ke atas	<u>716</u> jiwa		[7][1][6]	
213	Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	Laki-laki	Koding	Perempuan	Koding
	a. Petani	<u>388</u> jiwa	[3][8][8]	<u>98</u> jiwa	[0][9][8]
	b. Nelayan	<u>1371</u> jiwa	[1][3][7][1]	<u>0</u> jiwa	[0][0][0]
	c. Buruh Tani/ Nelayan	<u>323</u> jiwa	[3][2][3]	<u>17</u> jiwa	[0][1][7]
	d. Buruh Pabrik	<u>96</u> jiwa	[0][9][6]	<u>50</u> jiwa	[0][5][0]
	e. PNS	<u>53</u> jiwa	[0][5][3]	<u>35</u> jiwa	[0][3][5]
	f. Pegawai Swasta	<u>109</u> jiwa	[1][0][9]	<u>51</u> jiwa	[0][5][1]
	g. Wiraswasta/ pedagang	<u>2.474</u> jiwa	[2][4][7][4]	<u>1095</u> jiwa	[1][0][9][5]
	h. Lainnya, sebutkan <u>TNI / POLRI</u>	<u>16</u> jiwa	[0][1][6]	<u>0</u> jiwa	[0][0][0]
214	<b>Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus</b>				
	Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus (contoh: tunanetra, tunarungu, tunawicara, dll. Tidak termasuk gila atau penyakit jiwa lainnya)	Laki-laki	Koding	Perempuan	Koding
	<u>7</u> jiwa	[0][7]	<u>4</u> jiwa	[0][4]	



ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO.	III. DIMENSI SOSIAL	Diisi Petugas	
	<b>KESEHATAN</b>		
	<b>Ketersediaan sarana kesehatan</b>		
301	a. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa? ( <i>Jawaban hanya 1</i> )	1. Rumah Sakit Umum 2. Rumah Sakit Ibu dan Anak 3. Rumah Bersalin 4. Puskesmas 5. Pustus ⑥ Poskesdes 7. Polindes 8. Tempat Praktik Dokter 9. Klinik Dokter	[ 6 ]
	b. Berapa meter jarak ke sarana kesehatan terdekat? ( <i>sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a</i> )	<u>500</u> meter	[ 5 ] [ 0 ] [ 0 ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat ( <i>sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a</i> )?	<u>2</u> menit	[ 0 ] [ 2 ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan bidan</b>		
302	a. Apakah terdapat bidan Desa (BDD)?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	b. Jika ya, berapa jumlah bidan Desa?	<u>1</u> orang	[ 0 ] [ 1 ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan dokter</b>		
303	a. Apakah terdapat dokter yang praktik di Desa?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	b. Jika ya, berapa orang dokter yang praktik di Desa?	<u>4</u> orang	[ 0 ] [ 4 ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya</b>		
304	a. Apakah terdapat tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan yang praktik di Desa?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa orang tenaga kesehatan lainnya, selain dokter dan bidan di Desa?	<u>4</u> orang	[ 0 ] [ 4 ]
	<b>Akses ke Poskesdes/ Polindes dan Posyandu</b>		
305	a. Apakah tersedia sarana Poskesdes/ Polindes di Desa?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa meter jarak ke Poskesdes/ Polindes terdekat?	<u>500</u> meter	[ 5 ] [ 0 ] [ 0 ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke Poskesdes/ Polindes terdekat?	<u>2</u> menit	[ 0 ] [ 2 ]
	d. Apakah Poskesdes/ Polindes di Desa masih berfungsi/ aktif?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	e. Apakah terdapat rumah singgah / rumah tunggu untuk ibu hamil yang akan melahirkan?	1. Ya      ① Tidak	[ 0 ]
306	a. Berapa jumlah posyandu yang terdapat di desa?	<u>14</u> unit	[ 14 ]
	b. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan setiap sebulan sekali dalam setahun terakhir?	<u>14</u> unit	[ 14 ]
	c. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih dalam setahun terakhir?	<u>0</u> unit	[ 0 ]
	d. Apakah mayoritas warga Desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	e. Sumber pembiayaan kegiatan Posyandu di Desa	1. Iuran bulanan masyarakat ② APBDes 3. Iuran bulanan masyarakat dan APBDes 4. Lainnya	[ 2 ]
	<b>Tingkat Kepesertaan BPJS</b>		
307	a. Berapa jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan / JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)?	<u>2.298</u> orang	[ 2 ] [ 9 ] [ 8 ]
	b. Apakah warga desa memanfaatkan pelayanan BPJS?	① Ya, Sebagian besar 2. Ya, sebagian kecil 3. Tidak	[ 1 ]
	c. Berapa jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah?	<u>290</u> orang	[ 2 ] [ 9 ] [ 0 ]
	<b>Derajat Kesehatan dan Gizi Buruk</b>		
308	a. Apakah terdapat kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun 2018?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun 2018?	<u>1</u> kasus	[ 0 ] [ 1 ]
309	a. Apakah terdapat kejadian kematian balita di Desa selama tahun 2018?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian balita di Desa selama	<u>1</u> kasus	[ 0 ] [ 1 ]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	tahun 2018?		
310	a. Apakah terdapat kejadian kematian bayi di Desa selama tahun 2018?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian bayi di Desa selama tahun 2018?	<u>2</u> kasus	
311	a. Apakah terdapat kejadian balita gizi buruk di Desa selama tahun 2018?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian balita gizi buruk di Desa selama tahun 2018?	<u>2</u> kasus	
312	a. Apakah terdapat kejadian luar biasa penyakit di Desa selama tahun 2018?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
	b. Kejadian luar biasa penyakit apa yang terjadi di Desa selama tahun 2018?	Penyakit _____	
<b>PENDIDIKAN</b>			
<b>Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah</b>			
313	a. Berapa jumlah SD/MI (negeri/swasta) di Desa?	<u>7</u> unit	
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SD/MI (negeri/swasta) di Desa?	<u>133</u> orang	
	c. Berapa meter jarak ke SD / MI (negeri / swasta) terdekat?	<u>10</u> meter	
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat?	<u>1</u> menit	
314	a. Berapa jumlah SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa?	<u>3</u> unit	
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa?	<u>88</u> orang	
	c. Berapa meter jarak ke SMP / MTs (negeri / swasta) terdekat?	<u>700</u> meter	
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat?	<u>2</u> menit	
315	a. Berapa jumlah SMU / MA / SMK (negeri/swasta) di Desa?	<u>3</u> unit	
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMU / MA / SMK (negeri/swasta) di Desa?	<u>75</u> orang	
	c. Berapa meter jarak ke SMU / MA / SMK (negeri / swasta) terdekat?	<u>750</u> meter	
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SMU / MA / SMK terdekat?	<u>3</u> menit	
<b>Data Tingkat Pendidikan</b>			
316	Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa	1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat <input checked="" type="radio"/> 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat	
317	a. Apakah di Desa terdapat anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
	b. Berapa jumlah anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	<u>8</u> anak	
318	a. Apakah di Desa terdapat anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
	b. Berapa jumlah anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	_____ anak	
<b>Akses ke Pendidikan Non-Formal</b>			
319	a. Apakah terdapat Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak
	b. Berapa jumlah Pos PAUD yang beroperasi di Desa?	<u>5</u> unit	
	c. Berapa meter jarak Pos PAUD terdekat?	<u>20</u> meter	
	d. Berapa jumlah guru PAUD di Desa?	<u>21</u> orang	
320	Apakah terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B, dan C selama satu tahun terakhir di Desa?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
321	a. Berapa jumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus di desa?	<u>1</u> unit	
	b. Berapa jarak tempuh menuju pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus terdekat di Desa atau di luar Desa?	<u>50</u> meter	
<b>Akses Pengetahuan</b>			
322	a. Apakah terdapat fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat yang beroperasi? (jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "323")	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	b. Apakah penduduk Desa memanfaatkan fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
<b>MODAL SOSIAL</b>				
323	a. Apakah terdapat kebiasaan gotong royong warga di Desa? <i>(jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "324")</i>	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa kali kegiatan gotong royong warga di Desa dilaksanakan dalam setahun?	12 kali / tahun		[ 1 ] [ 2 ]
324	Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga untuk bersantai / bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka, taman, alun-alun, dll)?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
325	Apakah terdapat perkumpulan / organisasi sosial di desa, seperti: <i>(setiap pertanyaan 325.a-325.k harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>			
	Perkumpulan/ Organisasi Sosial	Ketersediaan		Koding
		Frekuensi kegiatan pertahun		
	a. Karang taruna	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. PKK	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Perkumpulan agama (majelis taklim, kebaktian, dan sejenisnya)	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	d. Panti asuhan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	e. Kelompok arisan	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	f. Kelompok/organisasi/lembaga tani	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	g. Kelompok/organisasi/lembaga nelayan	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	h. Kelompok/organisasi/lembaga Usaha ternak	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	i. Kelompok/organisasi/lembaga pengrajin	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	j. Kelompok/organisasi/lembaga khusus wanita	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	k. Lainnya, sebutkan:	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
326	a. Apakah sebagian besar warga Desa mengikuti musyawarah Desa? <i>(jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "327")</i>	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa kali musyawarah Desa diselenggarakan dalam satu tahun terakhir?	6 kali		[ 0 ] [ 6 ]
	c. Apakah terdapat kelompok perempuan yang mengikuti musyawarah Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
327	a. Berapa jumlah fasilitas / lapangan olah raga di Desa?	2 unit		[ 0 ] [ 2 ]
	b. Apakah terdapat kegiatan kelompok olahraga di Desa yang rutin dilakukan, seperti latihan rutin dan pertandingan olahraga?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Berapa jumlah kelompok kegiatan olah raga di Desa?	17 kelompok		[ 1 ] [ 7 ]
328	Apakah warga Desa terdiri dari lebih dari satu suku atau etnis?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
329	Apakah warga Desa sehari-hari berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
330	Apakah terdapat warga di Desayang menganut agama di bawah ini : <i>(setiap pertanyaan 330.a - 330.g harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>			
	a. Islam	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Kristen	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Katolik	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	d. Buddha	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	e. Hindu	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	f. Konghucu	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	g. Lainnya, sebutkan:	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
331	Apakah terdapat tempat ibadah: <i>(setiap pertanyaan A331.a - A331.f harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>			
	a. Masjid/ Musholla/ Langgar	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Gereja Kristen	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Gereja Katolik	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	d. Wihara	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	e. Pura	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	f. Litang/ Kelenteng	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
332	Apa agama / kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar / mayoritas warga Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Islam <input type="radio"/> 2. Kristen <input type="radio"/> 3. Katolik <input type="radio"/> 4. Buddha <input type="radio"/> 5. Hindu <input type="radio"/> 6. Konghucu <input type="radio"/> 7. Lainnya, sebutkan _____		[ 1 ]
333	a. Adakah kelompok seni adat dan budaya di Desa? (bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 334)	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	b. Bila ada, berapa kali kegiatan seni adat dan budaya diselenggarakan dalam setahun terakhir?	/ kali		[ 0 ] [ 1 ]
	c. Berapa jumlah kelompok kegiatan seni adat dan budaya di Desa?	/ kelompok		[ 0 ] [ 1 ]
334	Apakah mayoritas warga di Desa menghadiri perayaan adat budaya tertentu, seperti: (setiap pertanyaan 334.a – 334.d harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Kelahiran	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	b. Kematian	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	c. Perkawinan	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	d. Lainnya, sebutkan <u>petik laut</u>	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	<b>Keamanan Warga</b>			
335	Apakah terdapat warga di Desa yang melakukan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
336	Apakah terdapat warga di Desa yang berinisiatif dan berpartisipasi dalam pengaktifan sistem keamanan lingkungan?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
337	a. Apakah terdapat konflik di Desa selama setahun terakhir? (bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 339)	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Jika ada, sebutkan jenis konflik dan jumlah kejadian dalam setahun terakhir.	Jumlah Kejadian		
	b1. Antarkelompok masyarakat	0 kasus		[ 0 ]
	b2. Kelompok masyarakat antarDesa	0 kasus		[ 0 ]
	b3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	0 kasus		[ 0 ]
	b4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	0 kasus		[ 0 ]
	b5. Antarpelajar/mahasiswa/pemuda	0 kasus		[ 0 ]
	b6. Antarsuku	0 kasus		[ 0 ]
	b7. Antaragama	0 kasus		[ 0 ]
b8. Lainnya, sebutkan:	0 kasus		[ 0 ]	
338	a. Apakah sebagian besar konflik yang terjadi di Desa dapat diselesaikan dengan damai?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Jika ya, siapa yang berperan menjadi mediator / penengah upaya dalam penyelesaian konflik?			
	b1. Aparat keamanan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ]
	b2. Aparat pemerintah	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ]
	b3. Tokoh masyarakat	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ]
	b4. Tokoh agama	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ]
	b5. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ]
b6. Tidak ada	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ]	
339	Apakah terdapat penyelesaian konflik di desa oleh lembaga lokal sesuai adat budaya tertentu (misalnya diadakan ritual upacara dll) di Desa?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
340	a. Apakah terdapat tindak kejahatan sebagai berikut yang terjadi di Desa selama setahun terakhir?			
	a1. Pencurian	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a2. Penipuan/ penggelapan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	a3. Penganiayaan/ kekerasan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a4. Pembakaran	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a5. Perkosaan/ kejahatan terhadap susilaan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a6. Penyalahgunaan/ peredaran narkoba	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a7. Perjudian	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a8. Pembunuhan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a9. Perdagangan orang ( <i>humantrafficking</i> )	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di Desa, tindak kejahatan mana yang paling sering terjadi di Desa?	0		[ 0 ]
<b>Kesejahteraan Sosial</b>				
341	a. Apakah terdapat SLB (Sekolah Luar Biasa) di Desa?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Jika ada, berapa jumlah SLB yang terdapat di Desa?	0 unit		[ 0 ]
	c. Berapa jarak tempuh menuju SLB terdekat?	0 km		[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
342	Apakah terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai berikut : (setiap pertanyaan 342.a – 342.j harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Anak jalanan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Anak terlantar	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	c. Korban kekerasan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Lanjut usia terlantar (panti jompo)	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	e. Korban penyalahgunaan NAPZA	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	f. Pekerja migran terlantar	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	g. Gelandangan / pengemis	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	h. PSK (Pekerja Seks Komersial)	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
343	Berapa jumlah kejadian bunuh diri di Desa?	6 orang		[ 0 ]
<b>PERMUKTIMAN</b>				
<b>Akses Air Bersih dan Air Minum</b>				
344	Sumber air untuk minum yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 344.a – 344.i harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Air kemasan	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Sumur bor / pompa	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	e. Sumur	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	f. Mata air	<del>1. Ya</del>	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	g. Sungai / danau / kolam	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	h. Air hujan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	i. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
345	Bagaimana cara warga desa memperoleh air minum?	<input checked="" type="radio"/> 1. Gratis	0. Membeli	[ 1 ]
346	Sumber air untuk mandi / cuci yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 346.a – 346.h harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	c. Sumur bor / pompa	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Sumur	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	e. Mata air	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	f. Sungai / danau / kolam	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	g. Air hujan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	h. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
<b>Akses Sanitasi</b>				
347	Di manakah sebagian besar warga di Desa BAB (Buang Air Besar)? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Jamban sendiri <input type="radio"/> 2. Jamban bersama <input type="radio"/> 3. Jamban Umum <input type="radio"/> 4. Bukan jamban		[ 1 ]
348	Di manakah sebagian besar warga di Desa membuang sampah? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input type="radio"/> 1. Tempat sampah kemudian diangkat <input checked="" type="radio"/> 2. Dalam lubang atau dibakar <input type="radio"/> 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut <input type="radio"/> 4. Drainase (got/selokan) <input type="radio"/> 5. Lainnya, sebutkan _____		[ 2 ]
349	Apakah terdapat TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara)?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
350	Di manakah tempat / saluran warga membuang limbah cair rumah tangga / air kotor di Desa? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Lubang resapan (lubang tanah yang tertutup) <input type="radio"/> 2. Drainase (got/selokan) <input type="radio"/> 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut <input type="radio"/> 4. lubang tanah yang terbuka <input type="radio"/> 5. Lainnya, sebutkan _____		[ 1 ]
<b>Akses Listrik</b>				
351	a. Berapa jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN?	4668 keluarga		[ 4 ] [ 6 ] 68
	b. Berapa jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari non-PLN (Diesel/ generator, swasta, swadaya, perseorangan)?	0 keluarga		[ 0 ]
352	Berapa jumlah keluarga di Desa yang belum teraliri listrik sama sekali?	0 keluarga		[ 0 ]
353	Apakah terdapat sumber energi terbarukan (tenaga angin, air, surya/matahari, dll) di desa yang dimanfaatkan warga desa sebagai sumber listrik di Desa?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
<b>Akses Informasi &amp; Komunikasi</b>				
354	Bagaimana sinyal telepon seluler / <i>handphone</i> di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Sinyal Kuat	<input type="radio"/> 2. Sinyal lemah	<input type="radio"/> 0. Tidak ada sinyal
355	Operator / provider telepon seluler apa yang sinyalnya dapat diterima di desa?			
	a. Telkomsel (Simpati, Kartu AS, Kartu Halo)	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
	b. Indosat (IM3, Matrix, Mentari)	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
	c. XL	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
	d. Lainnya, sebutkan : <u>SMART FREN</u>	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
356	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran TVRI Nasional / TVRI Daerah?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
357	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran swasta?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
358	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran luar negeri?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
359	Apakah terdapat fasilitas internet di kantor kepala Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
360	Apakah penduduk Desa memiliki akses internet?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
361	Apakah Desa memiliki sarana informasi sebagai berikut			
	a. Papan informasi Desa	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]
	b. Website	<input type="radio"/> 1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	c. Lainnya, sebutkan <u>facebook, blogger</u>	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]



IV. DIMENSI EKONOMI						
Keragaman Produksi Masyarakat Desa						
401	Apa sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Desa? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan) 2. Industri 3. Perdagangan, transportasi, dan jasa 4. Pariwisata 5. Lainnya, sebutkan _____			[ 1 ]	
402	Apakah terdapat produk unggulan di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak		[ 1 ]	
403	Apakah produk komoditi hasil pertanian di Desa mengalami perubahan dibanding setahun yang lalu?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya, terdapat peningkatan <input type="radio"/> 0. Ya, terdapat penurunan			[ 1 ]	
404	a. Apakah terdapat produksi hasil tangkapan laut di Desa? ( <i>bila jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "405"</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak		[ 1 ]	
	b. Jika ya, Apakah terdapat perubahan produksi hasil tangkapan laut di Desa dibanding setahun yang lalu?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya, terdapat peningkatan <input type="radio"/> 0. Ya, terdapat penurunan			[ 1 ]	
405	a. Berapa jumlah industri mikro dan kecil di Desa?		22 unit		[ 2 ] [ 2 ]	
	b. Berapa jumlah industri menengah di Desa?		0 unit		[ 1 ] [ 0 ]	
Akses ke Pusat Perdagangan						
406	a. Apakah terdapat kelompok pertokoan di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak		[ 0 ]	
	b. Berapa km jarak ke kelompok pertokoan terdekat?		0 km		[ 0 ]	
407	Berapa jumlah pasar dengan bangunan permanen?		1 unit		[ 1 ]	
408	Berapa jumlah pasar dengan bangunan semi permanen?		0 unit		[ 0 ]	
409	a. Apakah terdapat pasar tanpa bangunan di Desa?	<input type="radio"/> 1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak		[ 0 ]	
	b. Berapa jumlah pasar tanpa bangunan di Desa?		0 unit		[ 0 ]	
410	Berapa jumlah toko / warung kelontong di Desa?		385 unit		[ 3 ] [ 85 ]	
411	Apakah terdapat warung / kedai makanan dan minuman di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak		[ 1 ]	
412	a. Apakah terdapat hotel atau penginapan (hostel, motel, losmen, wisma) di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak		[ 1 ]	
	b. Berapa meter jarak ke hotel atau penginapan terdekat?		2000 meter		[ 2 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]	
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke hotel atau penginapan terdekat?		5 menit		[ 0 ] [ 5 ]	
Akses Distribusi / Logistik		Ketersediaan		Koding	Jarak terdekat	Koding
413	Apakah terdapat kantor pos / pos pembantu / rumah pos / pos keliling di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]	1200 meter	[ 1 ] [ 12 ] [ 0 ] [ 0 ]
414	Apakah terdapat pelayanan jasa ekspedisi swasta (pengiriman barang) di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]	1200 meter	[ 1 ] [ 12 ] [ 0 ] [ 0 ]
Akses Lembaga Keuangan						
415	Apakah terdapat bank umum pemerintah (BRI, BNI, BPD, BTN, dll) di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak	[ 1 ]	50 meter	[ 0 ] [ 1 ] [ 5 ] [ 0 ]
416	Apakah terdapat bank swasta (Danamon, BCA, Niaga, dll) di Desa?	<input type="radio"/> 1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]	meter	[ ] [ ] [ ] [ 0 ]
417	Apakah tersedia BPR (Bank Perkreditan Rakyat) termasuk BPR Syariah di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak			[ 1 ]
418	Apakah terdapat fasilitas kredit yang diterima warga Desa selama setahun terakhir berupa:					
	a. KUR (Kredit Usaha Rakyat)	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input type="radio"/> 0. Tidak			[ 1 ]
	b. KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)	<input type="radio"/> 1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak			[ 0 ]
	c. KUK (Kredit Usaha Kecil)	<input type="radio"/> 1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak			[ 0 ]

ID DESA

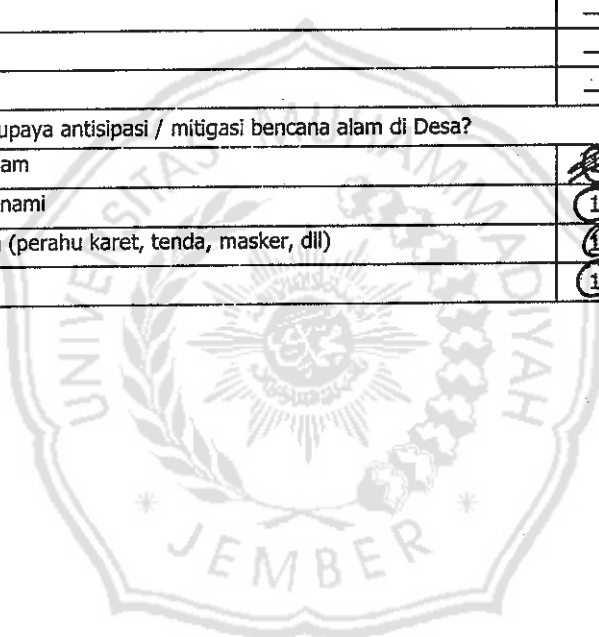
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	d. Kredit lainnya, sebutkan : _____	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
<b>Ketersediaan Lembaga Ekonomi</b>				
(419)	Berapa jumlah koperasi di bawah ini yang masih aktif beroperasi?	_____ unit		[ 0 ] [ 1 ]
420	a. Apakah terdapat BUMDesa di desa? ( <i>bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 421</i> )	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b. Jika ya, apa jenis / bidang usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tersebut? ( <i>setiap pertanyaan harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak"</i> )			
	<input checked="" type="radio"/> 1. Pelayanan umum	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b2. Jasa Penyewaan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	b3. Broker / usaha perantara	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	<input checked="" type="radio"/> 4. Perdagangan, pabrik, atau trading	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b5. Usaha bersama / holding	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	b6. Bisnis keuangan atau financial	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
<b>Keterbukaan Wilayah</b>				
421	Apakah di Desa terdapat angkutan umum? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Ada, dengan trayek tetap 2. Ada, tanpa trayek tetap 3. Tidak ada angkutan umum		[ 1 ]
422	Apakah angkutan umum yang utama di Desa beroperasi setiap hari?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
423	Kapan jam operasional angkutan umum yang utama?	1. Siang & malam hari	<input checked="" type="radio"/> 0. Hanya siang hari	[ 0 ]
424	Apakah jalan di Desa dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Sepanjang tahun 2. Sepanjang tahun kecuali saat tertentu 3. Tidak dapat dilalui sepanjang tahun		[ 1 ]
425	Apa jenis permukaan jalan di Desa yang terluas? ( <i>jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> 1. Aspal/ beton 2. Diperkeras (kerikil, batu, dll) 3. Tanah 4. Lainnya, sebutkan		[ 1 ]
426	Bagaimana kualitas permukaan jalan di Desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Baik 2. Rusak Sedang 3. Rusak Parah		[ 1 ]
<b>V. DIMENSI EKOLOGI</b>				
<b>Kondisi Lingkungan</b>				
501	Apakah sumber air tersedia sepanjang tahun?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya sepanjang tahun 2. Ya, kecuali saat tertentu seperti musim kemarau atau kondisi lainnya 3. Tidak		[ 1 ]
502	Apakah terjadi pencemaran lingkungan hidup di Desa selama setahun terakhir?			
	a. Pencemaran air	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	b. Pencemaran tanah	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	c. Pencemaran udara	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
503	Apakah terdapat dampak yang dirasakan oleh warga Desa akibat pencemaran lingkungan?	1. Menyebabkan gangguan kesehatan ringan 2. Menimbulkan penyakit / infeksi 3. Menimbulkan		[ 0 ]

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--

		kematian		
504	Apakah terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah pabrik/industri/usaha?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
<input checked="" type="radio"/> 505	Apakah terdapat perencanaan tata ruang desa?	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
506	Apakah terdapat perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
<b>Potensi Bencana</b>				
507	Seberapa sering kejadian/bencana alam yang terjadi selama 3 tahun terakhir?			
	a. Tanah longsor	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	b. Banjir	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	c. Gempa bumi	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	d. Tsunami	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	e. Gelombang pasang laut	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	f. Angin puyuh / puting beliung / topan	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	g. Gunung meletus	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	h. Kebakaran hutan	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	i. Kekeringan lahan	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
	j. Lainnya, sebutkan	<input type="radio"/> kali/ tahun		[ 0 ] [ 0 ]
508	Apakah terdapat fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam di Desa?			
	a. Peringatan dini bencana alam	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	<input checked="" type="radio"/> b. Peringatan dini khusus tsunami	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	<input checked="" type="radio"/> d. Jalur evakuasi	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]



ID DESA

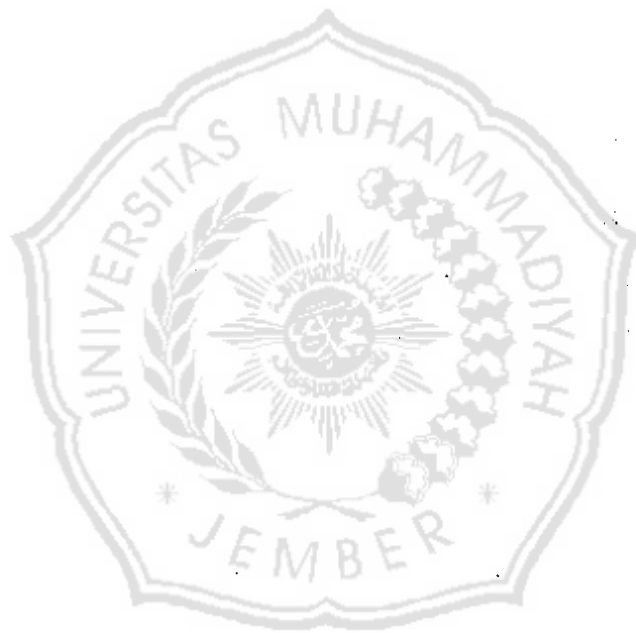
--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. AKTIVITAS DESA				
601	a. Apakah terdapat Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa jumlah pendamping lokal Desa di Kecamatan?	3 orang		[ 0 ] [ 3 ]
602	Apakah ada pelaku tingkat desa untuk memfasilitasi kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas, (termasuk KPMD, TPMD)?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
603	Berapa jumlah anggota KPMD (Kader Posyandu/Kader kesehatan) yang aktif	70 orang		[ 7 ] [ 0 ]
604	Berapa jumlah anggota TPMD yang aktif	5 orang		[ 0 ] [ 5 ]
605	Apakah ada kebun gizi di Desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat desa?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
606	Sebutkan sumber pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat di desa			
	1. BERAS			
	2.			
607	Apakah terdapat Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tentang Kesehatan dan Pendidikan?			
	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak		[ 0 ]
VII. SUMBER PENDAPATAN DESA				
		2017	2018	
701	a. Berapa total Dana Desa yang didapat tahun 2017 dan tahun 2018?	Rp 875.486.722	Rp 829.592.832	
	b. Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018			
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
	<input checked="" type="radio"/> b1. Sarana prasarana untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman	Rp 525.292.039	Rp 603.867.800	
	<input checked="" type="radio"/> b2. Sarana prasarana kesehatan masyarakat	Rp 194.600.070	Rp 55.200.000	
	<input checked="" type="radio"/> b3. Sarana prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan	Rp 24.985.070	Rp 70.837.800	
	b4. Sarana prasarana produksi dan distribusi	Rp	Rp	
	b5. Sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Rp	Rp	
	<input checked="" type="radio"/> b6. Program kegiatan pembangunan Desa lainnya:	Rp 45.609.689	Rp 18.908.800	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
	<input checked="" type="radio"/> b7. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Rp 0	Rp 20.000.000	
	b8. Dukungan kegiatan ekonomi	Rp 0	Rp 0	
	b9. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	Rp 0	Rp 0	
	b10. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	Rp 0	Rp 0	
b11. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Rp 0	Rp 0		
b12. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	Rp 0	Rp 0		
b13. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Rp 0	Rp 0		
<input checked="" type="radio"/> b14. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya:	Rp 35.000.070	Rp 60.678.432		
702	Informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat melalui			
	a. papan informasi	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. musyawarah Desa	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. website	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Lainnya, sebutkan <u>Facebook</u>	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
703	Sumber Pendapatan Desa			
	a. Berapa sumber dana dari Pendapatan Asli Desa?	2016 2017	2017 2018	
	b. Berapa sumber dana dari Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota?	Rp 222.162.500	Rp 225.162.500	
	c. Berapa sumber dana dari Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota?	Rp 98.176.132	Rp 123.468.000	
	d. Berapa sumber dana dari bantuan dari APBD Kabupaten/Kota termasuk BOK dan DAK / DAU?	Rp 0	Rp 0	
	e. Berapa sumber dana dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga?	Rp 0	Rp 0	
	f. Berapa sumber dana dari pendapatan desa lain yang sah?	Rp 0	Rp 0	

ID DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terimakasih atas partisipasi Anda





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER  
KANTOR DESA PUGER WETAN  
JALAN NGATMOREJO NO. 01 KODE POS 68164

BERITA ACARA  
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua ribu Delapan belas, bertempat di:

1. Desa Puger Wetan
2. Kecamatan Puger
3. Kabupaten Jember
4. Provinsi Jawa Timur

Telah dilakukan pengukuran indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai berikut.

KODE PROY	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2018	IKR 2018	IKL 2018	NILAI IDM 2018	STATUS IDM 2018
12	JAWA TIMUR	09	JEMBER	08	PUGER	12	Puger wetan	0,8	0,45	0,9333	0,7278	MAJU

Sehingga Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember ditetapkan dengan STATUS MAJU

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa

(EDY HARIYOKO, A.Md)

Di buat oleh: pendamping  
lokal desa

(HARIYONO)



KUESIONER PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Selamat pagi/sore. Saat ini kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan akan membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan pemerataan masyarakat di Desa yang lebih baik.

Kami sangat menghargai partisipasi Bapak/Ibu dalam pengumpulan data ini. Jawaban yang lengkap dan jujur akan sangat membantu. Informasi yang Bapak/Ibu berikan kami rahasiakan.

Mohon Bapak/Ibu menandatangani pernyataan di bawah ini serta dibubuhkan cap Desa.

**SEBELUM MENGISI KUESIONER INI, HARAP MEMBACA PANDUAN PENGISIAN KUESIONER TERLEBIH DAHULU SECARA SEKSAMA.**

Dengan ini saya bersedia mengikuti Pemutakhiran Informasi ini dan bersedia menjawab/mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dibawah ini.

*(Cap Desa)*  
Kantor Desa .....  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

Demikian kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

IP. Identitas Petugas

IP1	Nama Petugas	MUHAMMAD FUDH HARTONO, S.PA
IP2	Tanggal	20/12/2018
IP3	No. Telepon Rumah / Hp	085 231 618 462

Tanda Tangan Petugas

*(Tanda Tangan)*  
Muhammad Fudh Hartono





ID DESA 

3	5	0	9	0	8	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

213	b. 1-4 tahun	564	jiwa	[5][6][1][4]			
	c. 5-14 tahun	2073	jiwa	[2][0][1][7][3]			
	d. 15-39 tahun	5025	jiwa	[5][0][1][2][5]			
	e. 40-64 tahun	3505	jiwa	[3][5][1][0][5]			
	f. 65 tahun ke atas	317	jiwa	[3][1][1][1][7]			
	Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan						
214	a. Petani	264	jiwa	[2][6][1][4]	0	jiwa	[0][1][0][1][0]
	b. Nelayan	2700	jiwa	[2][7][0][0]	0	jiwa	[0][1][0][1][0]
	c. Buruh Tani/ Nelayan	572	jiwa	[5][7][2]	447	jiwa	[4][4][1][7]
	d. Buruh Pabrik	35	jiwa	[0][1][3][5]	42	jiwa	[0][1][4][1][2]
	e. PNS	17	jiwa	[0][1][1][7]	81	jiwa	[0][1][2][1][1]
	f. Pegawai Swasta	73	jiwa	[0][1][2][3]	47	jiwa	[0][1][4][1][7]
	g. Wiraswasta/ pedagang	89	jiwa	[0][1][2][9]	53	jiwa	[0][1][5][1][3]
	h. Lainnya, sebutkan	0	jiwa	[0][1][0][1][0]	0	jiwa	[0][1][0][1][0]
<b>Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus</b>							
Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus							
		Laki-laki		Koding		Perempuan	
		20 jiwa		[2][1][0]		15 jiwa	[1][1][1][5]
(contoh: tunanetra, tunarungu, tunawicara, dll. Tidak termasuk gila atau penyakit jiwa lainnya)							

## III. DIMENSI SOSIAL

Diisi Petugas

NO.	III. DIMENSI SOSIAL		Diisi Petugas
	<b>KESEHATAN</b>		
	<b>Ketersediaan sarana kesehatan</b>		
301	a. Apa sarana kesehatan yang terdekat di Desa? ( <i>Jawaban hanya 1</i> )	1. Rumah Sakit Umum 2. Rumah Sakit Ibu dan Anak 3. Rumah Bersalin 4. Puskesmas 5. Pustus 6. Poskesdes ⑦ Polindes 8. Tempat Praktik Dokter 9. Klinik Dokter	[ 7 ]
	b. Berapa meter jarak ke sarana kesehatan terdekat? ( <i>sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a</i> )	300 meter	[ 3 ] [ 0 ] [ 0 ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat? ( <i>sarana kesehatan berdasarkan jawaban 301.a</i> )	5 menit	[ 0 ] [ 5 ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan bidan</b>		
302	a. Apakah terdapat bidan Desa (BDD)?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
	b. Jika ya, berapa jumlah bidan Desa?	10 orang	[ 1 ] [ 0 ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan dokter</b>		
303	a. Apakah terdapat dokter yang praktik di Desa?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
	b. Jika ya, berapa orang dokter yang praktik di Desa?	1 orang	[ 1 ] [ 0 ] [ 0 ]
	<b>Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya</b>		
304	a. Apakah terdapat tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan yang praktik di Desa?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
	b. Berapa orang tenaga kesehatan lainnya, selain dokter dan bidan di Desa?	1 orang	[ 1 ] [ 0 ] [ 0 ]
	<b>Akses ke Poskesdes/ Polindes dan Posyandu</b>		
305	a. Apakah tersedia sarana Poskesdes/ Polindes di Desa?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
	b. Berapa meter jarak ke Poskesdes/ Polindes terdekat?	300 meter	[ 3 ] [ 0 ] [ 0 ]
	c. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke Poskesdes/ Polindes terdekat?	5 menit	[ 0 ] [ 5 ]
	d. Apakah Poskesdes/ Polindes di Desa masih berfungsi/ aktif?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
	e. Apakah terdapat rumah singgah / rumah tunggu untuk ibu hamil yang akan melahirkan?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
306	a. Berapa jumlah posyandu yang terdapat di desa?	11 unit	[ 1 ] [ 1 ]
	b. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan setiap sebulan sekali dalam setahun terakhir?	11 unit	[ 1 ] [ 1 ]
	c. Berapa jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan / pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih dalam setahun terakhir?	11 unit	[ 1 ] [ 1 ]
	d. Apakah mayoritas warga Desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu?	① Ya      0. Tidak	[ 1 ] [ 0 ]
	e. Sumber pembiayaan kegiatan Posyandu di Desa	1. Iuran bulanan masyarakat ② APBDes 3. Iuran bulanan masyarakat dan APBDes 4. Lainnya	[ 2 ]
	<b>Tingkat Kepesertaan BPJS</b>		
307	a. Berapa jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan / JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)?	2260 orang	[ 2 ] [ 2 ] [ 6 ]
	b. Apakah warga desa memanfaatkan pelayanan BPJS?	① Ya, Sebagian besar 2. Ya, sebagian kecil 3. Tidak	[ 1 ] [ 1 ]
	c. Berapa jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah?	2260 orang	[ 2 ] [ 2 ] [ 6 ]
	<b>Derajat Kesehatan dan Gizi Buruk</b>		
308	a. Apakah terdapat kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun 2018?	1 Ya      ① Tidak	[ 0 ] [ 1 ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian ibu melahirkan di Desa selama tahun 2018?	0 kasus	[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
309	a. Apakah terdapat kejadian kematian balita di Desa selama tahun 2018?	1 Ya      ① Tidak	[ 0 ] [ 1 ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian balita di Desa selama tahun 2018?	0 kasus	[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]



310	a. Apakah terdapat kejadian kematian bayi di Desa selama tahun 2018?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian kematian bayi di Desa selama tahun 2018?	0 kasus		[ 0 ] [ 0 ]
311	a. Apakah terdapat kejadian balita gizi buruk di Desa selama tahun 2018?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Jika Ya, berapa jumlah kejadian balita gizi buruk di Desa selama tahun 2018?	0 kasus		[ 0 ] [ 0 ]
312	a. Apakah terdapat kejadian luar biasa penyakit di Desa selama tahun 2018?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Kejadian luar biasa penyakit apa yang terjadi di Desa selama tahun 2018?	Penyakit _____		
<b>PENDIDIKAN</b>				
<b>Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah</b>				
313	a. Berapa jumlah SD/MI (negeri/swasta) di Desa?	4 unit		[ 0 ] [ 4 ]
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SD/MI (negeri/swasta) di Desa?	61 orang		[ 0 ] [ 6 ] [ 1 ]
	c. Berapa meter jarak ke SD / MI (negeri / swasta) terdekat?	500 meter		[ 5 ] [ 0 ] [ 0 ]
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat?	5 menit		[ 0 ] [ 5 ]
314	a. Berapa jumlah SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa?	1 unit		[ 0 ] [ 1 ]
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMP / MTs (negeri / swasta) di Desa?	20 orang		[ 0 ] [ 2 ] [ 0 ]
	c. Berapa meter jarak ke SMP / MTs (negeri / swasta) terdekat?	1000 meter		[ 1 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SD / MI terdekat?	10 menit		[ 1 ] [ 0 ]
315	a. Berapa jumlah SMU / MA / SMK (negeri/swasta) di Desa?	1 unit		[ 0 ] [ 1 ]
	b. Berapa jumlah tenaga pengajar SMU / MA / SMK (negeri/swasta) di Desa?	7 orang		[ 0 ] [ 0 ] [ 7 ]
	c. Berapa meter jarak ke SMU / MA / SMK (negeri / swasta) terdekat?	1000 meter		[ 1 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
	d. Berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke SMU / MA / SMK terdekat?	10 menit		[ 1 ] [ 0 ]
<b>Data Tingkat Pendidikan</b>				
316	Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa	1. Tamat Sarjana/ D1/ D3/Sederajat 2. Tamat SMA/Sederajat <input checked="" type="radio"/> 3. Tamat SMP/Sederajat 4. Tamat SD/Sederajat		[ 3 ]
317	a. Apakah di Desa terdapat anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Berapa jumlah anak usia SD yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	0 anak		[ 0 ] [ 0 ]
318	a. Apakah di Desa terdapat anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Berapa jumlah anak usia SMP yang putus atau tidak sekolah selama tahun 2018?	0 anak		[ 0 ] [ 0 ]
<b>Akses ke Pendidikan Non-Formal</b>				
319	a. Apakah terdapat Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa?	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa jumlah Pos PAUD yang beroperasi di Desa?	1 unit		[ 0 ] [ 1 ]
	c. Berapa meter jarak Pos PAUD terdekat?	700 meter		[ 7 ] [ 0 ] [ 0 ]
	d. Berapa jumlah guru PAUD di Desa?	3 orang		[ 0 ] [ 0 ] [ 3 ]
320	Apakah terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kejar Paket A, B, dan C selama satu tahun terakhir di Desa?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
321	a. Berapa jumlah pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus di desa?	0 unit		[ 0 ] [ 0 ]
	b. Berapa jarak tempuh menuju pusat kursus atau pusat pelatihan keterampilan khusus terdekat di Desa atau di luar Desa?	0 meter		[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
<b>Akses Pengetahuan</b>				
322	a. Apakah terdapat fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat yang beroperasi? (jika jawabannya "Tidak" lanjut ke pertanyaan "323")	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]

	h. Apakah penduduk Desa memanfaatkan fasilitas perpustakaan Desa atau taman bacaan masyarakat?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
<b>MODAL SOSIAL</b>				
323	a. Apakah terdapat kebiasaan gotong royong warga di Desa? <i>(jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "324")</i>	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa kali kegiatan gotong royong warga di Desa dilaksanakan dalam setahun?	24 kali / tahun		[ 2 ] [ 4 ]
324	Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga untuk bersantai / bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka, taman, alun-alun, dll)?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
325	Apakah terdapat perkumpulan / organisasi sosial di desa, seperti: <i>(setiap pertanyaan 325.a-325.k harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>			
	Perkumpulan / Organisasi Sosial	Ketersediaan	Koding	Frekuensi kegiatan pertahun
	a. Karang taruna	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	10 kali / tahun [ 1 ] [ 0 ]
	b. PKK	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	26 kali / tahun [ 2 ] [ 6 ]
	c. Perkumpulan agama (majelis taklim, kebaktian, dan sejenisnya)	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	12 kali / tahun [ 1 ] [ 2 ]
	d. Panti asuhan	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	0 kali / tahun [ 0 ] [ 0 ]
	e. Kelompok arisan	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	12 kali / tahun [ 1 ] [ 2 ]
	f. Kelompok/organisasi/lembaga tani	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	12 kali / tahun [ 1 ] [ 2 ]
	g. Kelompok/organisasi/lembaga nelayan	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 2 ]	2 kali / tahun [ 0 ] [ 2 ]
	h. Kelompok/organisasi/lembaga Usaha ternak	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	0 kali / tahun [ 0 ] [ 0 ]
	i. Kelompok/organisasi/lembaga pengrajin	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	12 kali / tahun [ 1 ] [ 2 ]
	j. Kelompok/organisasi/lembaga khusus wanita	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	15 kali / tahun [ 1 ] [ 5 ]
	k. Lainnya, sebutkan: <i>(KORPRI, PEREMPUAN DESA)</i>	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]	4 kali / tahun [ 0 ] [ 4 ]
326	a. Apakah sebagian besar warga Desa mengikuti musyawarah Desa? <i>(jika jawabannya "Tidak", lanjut ke pertanyaan "327")</i>	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Berapa kali musyawarah Desa diselenggarakan dalam satu tahun terakhir?	2 kali		[ 0 ] [ 2 ]
	c. Apakah terdapat kelompok perempuan yang mengikuti musyawarah Desa?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
327	a. Berapa jumlah fasilitas / lapangan olah raga di Desa?	0 unit		[ 0 ] [ 0 ]
	b. Apakah terdapat kegiatan kelompok olahraga di Desa yang rutin dilakukan, seperti latihan rutin dan pertandingan olahraga?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Berapa jumlah kelompok kegiatan olah raga di Desa?	5 kelompok		[ 0 ] [ 5 ]
328	Apakah warga Desa terdiri dari lebih dari satu suku atau etnis?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
329	Apakah warga Desa sehari-hari berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa?	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
330	Apakah terdapat warga di Desa yang menganut agama di bawah ini: <i>(setiap pertanyaan 330.a - 330.g harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>			
	a. Islam	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Kristen	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
	c. Katolik	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
	d. Buddha	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
	e. Hindu	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
	f. Konghucu	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
	g. Lainnya, sebutkan:	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
331	Apakah terdapat tempat ibadah: <i>(setiap pertanyaan A331.a - A331.f harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")</i>			
	a. Masjid/ Musholla/ Langgar	<input checked="" type="radio"/> Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Gereja Kristen	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]
	c. Gereja Katolik	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]	[ 0 ]



	d. Wihara	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	e. Pura	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	f. Litang/ Kelenteng	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
332	Apa agama / kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar / mayoritas warga Desa?	1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Buddha 5. Hindu 6. Konghucu 7. Lainnya, sebutkan _____		[ 1 ]
333	a.) Adakah kelompok seni adat dan budaya di Desa? (bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 334)	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Bila ada, berapa kali kegiatan seni adat dan budaya diselenggarakan dalam setahun terakhir?	3 kali		[ 0 ] [ 3 ]
	c.) Berapa jumlah kelompok kegiatan seni adat dan budaya di Desa?	2 kelompok		[ 0 ] [ 2 ]
334	Apakah mayoritas warga di Desa menghadiri perayaan adat budaya tertentu, seperti: (setiap pertanyaan 334.a - 334.d harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Kelahiran	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Kematian	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Perkawinan	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	d. Lainnya, sebutkan LAPUNG SESAJI, Beracak, tanam	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
<b>Keamanan Warga</b>				
335	Apakah terdapat warga di Desa yang melakukan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan?	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
336	Apakah terdapat warga di Desa yang berinisiatif dan berpartisipasi dalam pengaktifan sistem keamanan lingkungan?	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
337	a. Apakah terdapat konflik di Desa selama setahun terakhir? (bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 339)	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b. Jika ada, sebutkan jenis konflik dan jumlah kejadian dalam setahun terakhir.	Jumlah Kejadian		
	b1. Antarkelompok masyarakat	0 kasus		[ 0 ]
	b2. Kelompok masyarakat antarDesa	0 kasus		[ 0 ]
	b3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	0 kasus		[ 0 ]
	b4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	0 kasus		[ 0 ]
	b5. Antarpelajar/mahasiswa/pemuda	0 kasus		[ 0 ]
	b6. Antarsuku	0 kasus		[ 0 ]
	b7. Antaragama	0 kasus		[ 0 ]
	b8. Lainnya, sebutkan	0 kasus		[ 0 ]
338	a.) Apakah sebagian besar konflik yang terjadi di Desa dapat diselesaikan dengan damai?	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Jika ya, siapa yang berperan menjadi mediator / penengah upaya dalam penyelesaian konflik?			
	b1. Aparat keamanan	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b2. Aparat pemerintah	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b3. Tokoh masyarakat	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b4. Tokoh agama	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b5. Lainnya, sebutkan	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	b6. Tidak ada	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
339	Apakah terdapat penyelesaian konflik di desa oleh lembaga lokal sesuai adat budaya tertentu (misalnya diadakan ritual upacara dll) di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
340	a. Apakah terdapat tindak kejahatan sebagai berikut yang terjadi di Desa selama setahun terakhir?			
	a1. Pencurian	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
	a2. Penipuan/ penggelapan	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]

	a3. Penganiayaan/ kekerasan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a4. Pembakaran	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a5. Perkosaan/ kejahatan terhadap susilaan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a6. Penyalahgunaan/ peredaran narkoba	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a7. Perjudian	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a8. Pembunuhan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	a9. Perdagangan orang ( <i>humantrafficking</i> )	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di Desa, tindak kejahatan mana yang paling sering terjadi di Desa?		<input type="radio"/>	[ 0 ]
<b>Kesejahteraan Sosial</b>				
341	a. Apakah terdapat SLB (Sekolah Luar Biasa) di Desa?	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Jika ada, berapa jumlah SLB yang terdapat di Desa?		<input type="radio"/> unit	[ 0 ]
	c. Berapa jarak tempuh menuju SLB terdekat?		<input type="radio"/> km	[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
342	Apakah terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai berikut: (setiap pertanyaan 342.a – 342.j harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Anak jalanan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Anak terlantar	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	c. Korban kekerasan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Lanjut usia terlantar (panji jompo)	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	e. Korban penyalahgunaan NAPZA	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	f. Pekerja migran terlantar	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	g. Gelandangan / pengemis	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	h. PSK (Pekerja Seks Komersial)	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
343	Berapa jumlah kejadian bunuh diri di Desa?		<input type="radio"/> orang	[ 0 ]
<b>PERMUKIMAN</b>				
<b>Akses Air Bersih dan Air Minum</b>				
344	Sumber air untuk minum yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 344.a – 344.i harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Air kemasan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	b. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	c. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Sumur bor / pompa	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	e. Sumur	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	f. Mata air	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	g. Sungai / danau / kolam	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	h. Air hujan	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	i. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
345	Bagaimana cara warga desa memperoleh air minum?	<input checked="" type="radio"/> Gratis	<input type="radio"/> Membeli	[ 1 ]
346	Sumber air untuk mandi / cuci yang digunakan oleh warga di Desa (setiap pertanyaan 346.a – 346.f harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak")			
	a. Air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	b. Air ledeng tanpa meteran	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	c. Sumur bor / pompa	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	d. Sumur	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	e. Mata air	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	f. Sungai / danau / kolam	1. Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]



	g. Air hujan	1. Ya	0. Tidak	[ ]
	h. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak	[ ]
<b>Akses Sanitasi</b>				
347	Di manakah sebagian besar warga di Desa BAB (Buang Air Besar)? <i>(Jawaban hanya satu pilihan)</i>	1. Jamban sendiri 2. Jamban bersama 3. Jamban Umum 4. Bukan jamban		[ ]
348	Di manakah sebagian besar warga di Desa membuang sampah? <i>(Jawaban hanya satu pilihan)</i>	1. Tempat sampah kemudian diangkut 2. Dalam lubang atau dibakar 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut 4. Drainase (got/selokan) 5. Lainnya, sebutkan		[ 2 ]
349	Apakah terdapat TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara)?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
350	Di manakah tempat / saluran warga membuang limbah cair rumah tangga / air kotor di Desa? <i>(Jawaban hanya satu pilihan)</i>	1. Lubang resapan (lubang tanah yang tertutup) 2. Drainase (got/selokan) 3. Sungai / saluran irigasi / danau / laut 4. lubang tanah yang terbuka 5. Lainnya, sebutkan		[ ]
<b>Akses Listrik</b>				
351	a. Berapa jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN?	3271	keluarga	[ ] [ ] [ ]
	b. Berapa jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari non-PLN (Diesel/ generator, swasta, swadaya, perseorangan)?	0	keluarga	[ 0 ]
352	Berapa jumlah keluarga di Desa yang belum teraliri listrik sama sekali?	0	keluarga	[ 0 ]
353	Apakah terdapat sumber energi terbarukan (tenaga angin, air, surya/matahari, dll) di desa yang dimanfaatkan warga desa sebagai sumber listrik di Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
<b>Akses Informasi &amp; Komunikasi</b>				
354	Bagaimana sinyal telepon seluler / <i>handphone</i> di Desa?	1. Sinyal Kuat	2. Sinyal Lemah	0. Tidak ada sinyal
355	Operator / provider telepon seluler apa yang sinyalnya dapat diterima di desa?			
	a. Telkomsel (Simpati, Kartu AS, Kartu Halo)	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
	b. Indosat (IM3, Matrix, Mentari)	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
	c. XL	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
	d. Lainnya, sebutkan :	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
356	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran TVRI Nasional / TVRI Daerah?	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
357	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran swasta?	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
358	Apakah Desa dapat menerima siaran program televisi saluran luar negeri?	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
359	Apakah terdapat fasilitas internet di Kantor Kepala Desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
360	Apakah penduduk Desa memiliki akses internet?	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
361	Apakah Desa memiliki sarana informasi sebagai berikut			
	a. Papan Informasi Desa	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
	b. Website	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]
	c. Lainnya, sebutkan <u>Media Sosial</u>	1. Ya	0. Tidak	[ ] [ ]

IV. DIMENSI EKONOMI

Keragaman Produksi Masyarakat Desa					
401	<p>1. Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan)</p> <p>2. Industri</p> <p>3. Perdagangan, transportasi, dan jasa</p> <p>4. Pariwisata</p> <p>5. Lainnya, sebutkan</p>	[ ]			
402	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
403	<p>1. Ya, terdapat peningkatan</p> <p>0. Ya, terdapat penurunan</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
404	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
405	<p>1. Ya, terdapat peningkatan</p> <p>0. Ya, terdapat penurunan</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
	<p>10 unit</p> <p>0 unit</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
<b>Akses ke Pusat Perdagangan</b>					
406	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
	<p>0 km</p> <p>0 unit</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
407	<p>0 unit</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
408	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
409	<p>0 unit</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
410	<p>1 unit</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
411	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
412	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
	<p>0 meter</p> <p>0 menit</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
<b>Akses Distribusi / Logistik</b>		<b>Ketersediaan</b>	<b>Koding</b>	<b>Jarak terdekat</b>	<b>Koding</b>
413	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
414	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
<b>Akses Lembaga Keuangan</b>					
415	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
416	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
417	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
418	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	
	<p>1. Ya</p> <p>0. Tidak</p>	[ ]	[ ]	[ ]	



	d. Kredit lainnya, sebutkan... <i>negosiasi</i>	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	<b>Ketersediaan Lembaga Ekonomi</b>			
419	Perapa jumlah koperasi di bawah ini yang masih aktif beroperasi?		0 unit	[ 0 ] [ 0 ]
420	a. Apakah terdapat BUMDesa di desa? ( <i>bila jawaban "Tidak", lanjut ke pertanyaan 421</i> )	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ ] [ ]
	b. Jika ya, apa jenis / bidang usaha yang dilakukan oleh BUMDesa tersebut? ( <i>setiap pertanyaan harus diisi dengan melingkari salah satu jawaban "Ya" atau "Tidak"</i> )			
	b1. Pelayanan umum	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b2. Jasa Penyewaan	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b3. Broker / usaha perantara	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	[ 1 ]
	b4. Perdagangan, pabrik, atau trading	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b5. Usaha bersama/ holding	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b6. Bisnis keuangan atau financial	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	<b>Keterbukaan Wilayah</b>			
421	Apakah di Desa terdapat angkutan umum? ( <i>Jawaban hanya satu pilihan</i> )	1. Ada, dengan trayek tetap	<input checked="" type="radio"/> Ada, tanpa trayek tetap	[ 2 ]
		2. Ada, tanpa trayek tetap		
		3. Tidak ada angkutan umum		
422	Apakah angkutan umum yang utama di Desa beroperasi setiap hari?	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
423	Kapan jam operasional angkutan umum yang utama?	1. Siang & malam hari	0. Hanya siang hari	[ 0 ]
424	Apakah jalan di Desa dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih? ( <i>Jawaban hanya satu pilihan</i> )	<input checked="" type="radio"/> Sepanjang tahun	2. Sepanjang tahun kecuali saat tertentu	[ 1 ]
		3. Tidak dapat dilalui sepanjang tahun		
425	Apa jenis permukaan jalan di Desa yang terluas? ( <i>Jawaban hanya satu pilihan</i> )	1. Aspal/ beton	<input checked="" type="radio"/> Diperkeras (kerikil, batu, dll)	[ 2 ]
		3. Tanah		
		4. Lainnya, sebutkan		
426	Bagaimana kualitas permukaan jalan di Desa?	1. Baik	<input checked="" type="radio"/> Rusak Sedang	[ 2 ]
		3. Rusak Parah		
<b>V. DIMENSI EKOLOGI</b>				
	<b>Kondisi Lingkungan</b>			
501	Apakah sumber air tersedia sepanjang tahun?	<input checked="" type="radio"/> Ya sepanjang tahun	2. Ya, kecuali saat tertentu seperti musim kemarau atau kondisi lainnya	[ 1 ]
		3. Tidak		
502	Apakah terjadi pencemaran lingkungan di desa selama setahun terakhir?			
	a. Pencemaran air	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	b. Pencemaran tanah	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
	c. Pencemaran udara	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak	[ 0 ]
503	Apakah terdapat dampak yang dirasakan oleh warga Desa akibat pencemaran lingkungan?	1. Menyebabkan gangguan kesehatan ringan	2. Menyebabkan penyakit infeksi	[ 0 ]
		3. Menyebabkan		

504	Apakah terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah pabrik/industri/usaha?	kematian		
505	Apakah terdapat perencanaan tata ruang desa?	1. Ya	0. Tidak	[ 0 ]
506	Apakah terdapat perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian?	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	<b>Potensi Bencana</b>	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
507	Seberapa sering kejadian/bencana alam yang terjadi selama 3 tahun terakhir?			
	a. Tanah longsor	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	b. Banjir	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	c. Gempa bumi	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	d. Tsunami	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	e. Gelombang pasang laut	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	f. Angin puyuh / puting beliung / topan	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	g. Gunung meletus	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	h. Kebakaran hutan	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	i. Kekerangan lahan	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
	j. Lainnya, sebutkan	<input type="radio"/>	kali/ tahun	[ 0 ] [ 0 ]
508	Apakah terdapat fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam di Desa?			
	a. Peringatan dini bencana alam	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	b. Peringatan dini khusus tsunami	<input checked="" type="radio"/> 1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)	1. Ya	<input checked="" type="radio"/> 0. Tidak	[ 0 ]
	d. Jalur evakuasi	1. Ya	0. Tidak	[ 1 ]



**VI. AKTIVITAS DESA**

601	a. Apakah terdapat Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa?	1. Ya 2 orang	0. Tidak	[ ]
	b. Berapa jumlah pendamping lokal Desa di Kecamatan?	2 orang		[0][2]
602	Apakah ada pelaku tingkat desa untuk memfasilitasi kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas, (termasuk KPMD, TPMD)?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
603	Berapa jumlah anggota KPMD (Kader Posyandu/Kader kesehatan) yang aktif	3 orang		[0][3]
604	Berapa jumlah anggota TPMD yang aktif	0 orang		[0][0]
605	Apakah ada kebun gizi di Desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat desa?	1. Ya	0. Tidak	[ ]
606	Sebutkan sumber pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat di desa			
	1. HASIL PANJARAN (PADU)			
	2. HASIL LAUT (KAKI)			
	3.			
607	Apakah terdapat Peraturan Desa / Keputusan Kepala Desa tentang Kesehatan dan Pendidikan?	1. Ya	0. Tidak	[ ]

**VII. SUMBER PENDAPATAN DESA**

701	a. Berapa total Dana Desa yang didapat tahun 2017 dan tahun 2018?	2017 Rp 869.359.711,-	2018 Rp 1.693.041.736,-
	b. Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018		

**Pelaksanaan Pembangunan Desa**

b1.	Sarana prasarana untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman	Rp 0	Rp 0
b2.	Sarana prasarana kesehatan masyarakat	Rp 151.000.000	Rp -
b3.	Sarana prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan	Rp 0	Rp 0
b4.	Sarana prasarana produksi dan distribusi	Rp 0	Rp 0
b5.	Sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Rp 0	Rp 0
b6.	Program kegiatan pembangunan Desa lainnya:	Rp 680.200.000	Rp 874.062.736,-

**Pemberdayaan Masyarakat Desa**

b7.	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Rp 0	Rp 0
b8.	Dukungan kegiatan ekonomi	Rp 0	Rp 0
b9.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	Rp 0	Rp 0
b10.	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Rp 0	Rp 0
b11.	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Rp 0	Rp 0
b12.	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa.	Rp 0	Rp 0
b13.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Rp 0	Rp 0
b14.	Program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya:	Rp 0	Rp 0

702	Informasi APBDes disebarluaskan ke masyarakat melalui		
a.	papan informasi	1. Ya	0. Tidak
b.	musyawarah Desa	1. Ya	0. Tidak
c.	website	1. Ya	0. Tidak
d.	Lainnya, sebutkan <u>Banner</u>	1. Ya	0. Tidak

703	Sumber Pendapatan Desa	2017	2018
a.	Berapa sumber dana dari Pendapatan Asli Desa?	Rp 251.200.000,-	Rp 251.600.000,-
b.	Berapa sumber dana dari Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota?	Rp 52.067.800,-	Rp 14.257.000,-
c.	Berapa sumber dana dari Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota?	Rp 792.713.915,-	Rp 690.870.000,-
d.	Berapa sumber dana dari bantuan dari APBD Kabupaten/Kota termasuk BOK dan DAK / DAU?	Rp 0	Rp 0
e.	Berapa sumber dana dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga?	Rp 0	Rp 0
f.	Berapa sumber dana dari pendapatan desa lain yang sah?	Rp 0	Rp 0